



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)**

## **DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**Jl. Cut Nyak Dien III Pekanbaru**

**Telp. (0761) 39973 – 23810, Fax (0761) 39973**

**Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : [dinaskesehatan@riau.go.id](mailto:dinaskesehatan@riau.go.id)**



## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan untuk selanjutnya diverifikasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2017 S/D TRIWULAN II TAHUN 2018
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Juli 2018

**GUBERNUR RIAU,**



**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 23 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**



**AHMAD HLJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 43



**TABEL VERIFIKASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020**

**OPD : DINAS KESEHATAN**

NO	BAB/SUB BAB	SUBSTANSI MATERI	TABEL / SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>					
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja perangkat daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKP, Renstra Perangkat Daerah, dengan renja K/I dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tindak Lanjut dengan Proses Penyusunan RAPBD		V		
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah			V	Halaman 2 Perbaiki typo kesalahan ketik, nomor 22 tidak relevan
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan Maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah		V		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta Susunan garis besar isi Dokumen.		V		
2	<b>BAB II hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018</b>					
	2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun N - 2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun N - 1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun-tahun Sebelumnya. Review hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan Kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Tabel yang perlu disajikan adalah tabel T-c.29 yang disesuaikan dengan perangkat Daerah Masing- Masing	TC.29		V	perbaiki kesalahan ketik, beri tambahan penjelasan capaian realisasi kegiatan yang rendah (halaman 13 s/d 21), perbaiki tabel evaluasi renja
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat Daerah berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008. pada pembahasan Sub Bab Inin perlu disajikan tabel analisis capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah Masing- masing, dengan Format Tabel T- C.30	TC.30		V	tabel TC 30 diisi dengan indikator yang terkait dengan SPM atau NSPKserta IKU dan IKK saja
	2.3. Isu - isu Penting	Berisikan Uraian Megenai :				

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah	<p>1. Sejauh mana tingkat Kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal terkait dengan pelayanan perangkat daerah; Khusus provinsi,uraikan mengenai koordinasi dan sinergi programantara perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan;</p> <p>2. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat Daerah</p> <p>3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan misi kepala daerah,terjadap Capaian Program Nasional/internasional seperti NSPKSPM dan Sdgs;</p> <p>4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan</p> <p>5. Formulasi isu- isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun berjalan</p>		V	V	diberi tambahan penjelasan dan analisis dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan capaian nasional (SDGs dll)
2.4. Review terhadap RKPD Provinsi Riau Tahun 2020	<p>Berisikan Uraian Mengenai;</p> <p>1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan;</p> <p>2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</p> <p>3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, Provinsi Riau Tahun 2020 misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 atu program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan</p> <p>4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31</p>	TC. 31		V V V V	<p>Ditambahkan penjelasan</p> <p>Ditambahkan penjelasan</p> <p>Ditambahkan penjelasan</p> <p>Ditambahkan penjelasan analisis kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD</p>
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat				V	diperbaiki usulan pemangku kepentingan usulan dari masyarakat bukan dari internal OPD
<b>3</b>	<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>				
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.		V		
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.		V		
3.3 Program dan kegiatan	<p>Berisikan penjelasan mengenai:</p> <p>a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;</p> <p>b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;</p>			V V	<p>Ditambahkan penjelasan halaman 30</p> <p>Ditambahkan penjelasan</p>

		c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33		V	Ditambahkan penjelasan
4	<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>				
5	<b>BAB V PENUTUP</b>	Berisikan uraian penutup: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; c. Rencana tindak lanjut.		V	

Pekanbaru, Juli 2019

Verifikator

Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tuti Rahmawati  
Nip : 19740713 200604 2004

SRI GEMALA MELAYU, ST  
Nip. 19781230 200604 2 016



Formulir E. 29  
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan  
Renja Perangkat Daerah  
Provinsi Riau

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Provinsi				
2	Pengolahan data dan informasi				
3	Analisis Gambaran pelayanan Perangkat Daerah				
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Provinsi				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi				
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Provinsi				
7	Perumusan tujuan dan sasaran				
8	Penelaahan usulan masyarakat				
9	Perumusan kegiatan prioritas				
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah provinsi				
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota				
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi				
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sesuai surat edaran Gubernur				

11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu				
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah provinsi				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat daerah Provinsi telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju				
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disahkan				

Pekanbaru,





Pekanbaru,  
Kepala Dinas

Dra. Mimi \  
Pembina U  
NIP. 19660

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Renja ini bertujuan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai APBD Provinsi Riau, APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami sangat menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi Riau maupun pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan Renja pada tahun yang akan datang. Namun demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2019



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	30
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.....	32
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	32







# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Guna mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran dan yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang [RPJP/D], Rencana Pembangunan Jangka Mengah [RPJM/D] dan Rencana Kerja Pemerintah [RKP/D] sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjut, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKP/D serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. di dalam Renja SKPD akan memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKP/D sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 mengacu pada RKP/D Tahun 2020. disamping itu penyusunan Renja ini juga disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai pada tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya serta usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara No. 4438);
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005 – 2025;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencanastrategis (Renstra) Kementrian Kesehatan tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Momor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No. 4);
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020.
24. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Perangkat Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan menjabarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam jangka pendek [1 tahun]. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan anggaran tersebut termasuk untuk tiga (3) UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu : UPT Bapelkes, UPT Labkesling dan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan. Anggaran tersebut untuk membiayai 17 Program pembangunan kesehatan sebagai berikut:

1. Program obat dan perbekalan kesehatan;
2. Program upaya kesehatan masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program perbaikan gizi masyarakat;
5. Program pengembangan lingkungan sehat;
6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
7. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit ;
9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
10. Program pelayanan instalasi farmasi dan logistik kesehatan;
11. Program pengendalian penyakit tidak menular;
12. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan;
13. Program manajemen dan informasi kesehatan;
14. Program diklit dan penelitian kesehatan;
15. Program penanggulangan krisis;
16. Program pelayanan laboratorium klinis dan lingkungan;
17. Program pembiayaan kesehatan.

Selain 17 program utama tersebut ditambahkan 5 program pendukung/rutin yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
5. Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan.

Penyerapan Dana APBD Tahun 2018, secara terinci penyerapan per program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	PROGRAM	PAGU APBD	PENYERAPAN	%
1	Gaji Pegawai	42.417.557.109,00	41.619.258.167,00	98,12
2	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.761.192.683,00	3.440.640.606,00	72,26
3	Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	12.792.639.660,00	1.736.388.200,00	13,57
4	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	176.050.000,00	155.925.000,00	88,57
5	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	357.950.000,00	85.043.500,00	23,76
6	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	134.241.000,00	52.724.200,00	39,28
7	Program : Obat Dan Perbekalan Kesehatan	1.346.223.000,00	287.379.300,00	21,35
8	Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	8.043.316.304,90	2.951.562.691,00	36,70
9	Program : Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	6.770.583.940,00	709.104.151,00	10,47
10	Program : Perbaikan Gizi Masyarakat	1.272.642.000,00	385.107.800,00	30,26
11	Program : Pengembangan Lingkungan Sehat	1.903.240.260,00	638.524.940,00	33,55
12	Program : Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	7.480.735.100,00	1.998.440.988,00	26,71

13	Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	263.795.400,00	165.814.900,00	62,86
14	Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/	209.108.400,00	23.144.900,00	11,07
15	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	2.030.384.900,00	256.821.450,00	12,65
16	Program : Pelayanan Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan	15.222.820.581,00	2.629.549.220,00	17,27
17	Program : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	702.374.500,00	274.628.100,00	39,10
18	Program : Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	7.837.502.060,00	6.594.454.400,00	84,14
19	Program : Manajemen Dan Informasi Kesehatan	4.915.295.800,00	1.284.466.086,00	26,13
20	Program : Diklat Dan Pelatihan Kesehatan	3.600.581.380,00	37.787.000,00	1,05
21	Program : Penanggulangan Krisis Kesehatan	444.426.600,00	259.323.500,00	58,35
22	Program : Pelayanan Laboratorium Klinis Dan Lingkungan	6.972.880.500,00	2.236.750.280,00	32,08
23	Program : Pembiayaan Kesehatan	87.383.338.340,00	74.853.625.906,00	85,66

Penyerapan anggaran Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2018 belum bisa optimal disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga pada tahun tersebut hampir semua kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sehingga imbas dari hal tersebut diatas rendahnya serapan anggaran pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang mencapai keberhasilan baik fisik maupun keuangan maka dari itu akan dirincikan sebagai berikut :

**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan**

- Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial/Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur;
- Pendidikan Dan Pelatihan Formal;
- Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Provinsi Riau;
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan;
- Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONEC;
- Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Tingkat provinsi;
- Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi;
- Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan;
- Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan;
- Penanggulangan Masalah Gizi;
- Pemantauan Status Gizi Masyarakat;
- Peningkatan dan Pengembangan wilayah STBM
- Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit Menular lainnya;
- Peningkatan Program Kesehatan Haji;
- Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI;
- Survey Kusta Frambusia;
- Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP);
- Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- Pengelolaan Kesehatan Matra;
- Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB);
- Pengelolaan Data Sarana Kesehatan.

## **2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan**

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi;
- Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi;
- Pengadaan Program Obat;
- Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau;
- Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung Kantor UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK);
- Rehab Gedung UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK);
- Pengangkatan dan Penempatan Paramedis PTT Provinsi Riau;
- Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah);
- Penyediaan Biaya Jamkesda;
- Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki JKN/KIS.

## **3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan.**

Untuk program dan kegiatan yang melebihi target kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau belum ada, ini dikarenakan pada tahun 2018 terjadi pengurangan pagu anggaran, sehingga ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

## **4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

- Kurangnya penguatan komitmen pelayanan dalam penerapan SPM bidang kesehatan;
- Masih kurangnya koordinasi antara kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Kurangnya koordinasi lintas sector dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dan program seperti GERMAS, Pemeriksaan Kesehatan 3 bulan sekali, Penerapan kawasan bebas asap ROKOK;

- Masih rendahnya bantuan anggaran dari PEMDA/Kabupaten/Kota dalam mendukung program;
  - Penempatan sumber daya manusia yang belum merata.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor faktor penyebab tersebut
    - Penguatan komitmen pelayanan dengan pendekatan keluarga dengan 12 indikator SPM bidang kesehatan dengan mengupayakan tersedianya data sasaran berdasarkan NIK (by name, by address);
    - Meningkatkan capaian target 12 indikator SPM bidang kesehatan di tahun 2019;
    - Melaksanakan SPM bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab kab/kota sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 dan Permenkes No 4 Tahun 2019;
    - Melakukan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencapaian SPM bidang kesehatan dengan meningkatkan peran serta Tim Penerapan SPM kab/kota berdasarkan Permendagri No 100 Tahun 2018;
    - Mendorong tenaga kesehatan yang punya inovasi melakukan pencapaian indikator SPM , mempromosikan ke pemerintah daerah kab/kota;
    - Membuat peraturan bupati/walikota yang mendukung pelaksanaan SPM bidang kesehatan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan dalam upaya percepatan pencapaian SPM bidang Kesehatan;
    - Memprioritaskan ketersediaan anggaran kab/kota ntuk mendukung pencapaian pelaksanaan SPM bidang kesehatan.

Capaian kinerja dari 17 program pembangunan kesehatan tersebut tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program obat dan perbekalan kesehatan**

Target dan realisasi indikator kinerja program obat dan perbekalan kesehatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasyankes Dasar Pemerintah	80%	90.1%	100

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Realisasi Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasyankes Dasar Pemerintah pada tahun 2018 adalah sebesar 90.1% , realisasi 2018 menunjukkan adanya kenaikan jika dibanding targetnya. Komitmen yang tinggi dalam menunjang penggunaan obat rasional di fasyankes serta adanya kebijakan yang diatur dalam sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan, dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

## 2. Program upaya kesehatan masyarakat

Target dan realisasi program upaya kesehatan masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Target Dan Realisasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,85 per 1000 pddk	1.38 per 1000 pddk	162,3
2	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	38%	11 %	28
3	Jumlah kecamatan yang PKM Terakreditasinya	100 kec	147 kec	147%
4	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	46%	40%	87%
5	Persentase PKM Rawat inap yang mampu PONED	75%	79%	105%
6	Jumlah RS Milik Pemerintah yang terakreditasi	17	21	123%
7	Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONED	75%	68.42%	91.22%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Pada tahun 2018, persentase fasilitas kesehatan rujukan sesuai standar dengan realisasi sebesar 1.38 per 1000 pddk (162,3%) naik jika dibanding targetnya, melalui kegiatan



visitasi dan klasifikasi perizinan RS dengan agar RS melakukan akreditasi sesuai yang diisyaratkan oleh UU No. 44 tahun 2009 dan atau Permenkes No. 56 tahun 2014.

### 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Target dan realisasi indikator kinerja program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (Prilaku Hidup bersih dan Sehat)	65%	59.1 %	90.77%
	Persentase RS yang menerapkan PKRS (Promosi Kesehatan di RS)	40%	20.8%	52%
	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	40%	91.84%	229.6%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Hasil pencapaian indikator diperoleh melalui survey dan penilaian terhadap rumah tangga yang ber PHBS. Target Provinsi Riau tahun 2018 adalah 65%, dengan realisasi meningkat 59,1% dengan capaian 90,92% target Provinsi Riau tahun 2017 adalah 60%, dengan realisasi 49,1% dengan capaian 81,8%. Untuk pelaksanaan PKRS tahun 2018 dengan target 40% realisasinya 20,8% dengan capaian 52%. Hasil pelaksanaan UKBM tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 91,84% dari target sebesar 40% dengan capaian indikator 229,6% indikator ini dikatakan sangat berhasil.

### 4. Program perbaikan gizi masyarakat

Target dan realisasi Program perbaikan gizi masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Target Dan Realisasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Prevalensi Gizi Buruk Balita	<1,2%	1.4%	83.3%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 83.3% ini masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan kab/kota di Provinsi Riau telah melaksanakan

kegiatan intervensi gizi secara optimal, diantaranya pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan dan PMT pemulihan, serta peningkatan pengetahuan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE), antara lain : peningkatan penggunaan air susu ibu (ASI) eksklusif, pemberian makanan bayi dan anak yang tepat, pemantauan pertumbuhan yang terartur di posyandu dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sedangkan yang sudah mengalami gizi buruk dilakukan perawatan intensif sesuai standar perawatan balita gizi buruk secara komprehensif dan lintas sektor, baik rawat jalan maupun rawat inap. Disamping kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, juga dilakukan penyediaan anggaran oleh masing-masing kab/kota, tidak hanya tingkat provinsi maupun pusat. Persentase balita stunting pada tahun 2018 adalah sebesar 27,2%. Salah satu gambaran pelaksanaan dalam menemukan balita stunting yaitu dengan melibatkan *leading sector* yang terlibat dalam penanganannya. Masalah gizi sangat terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Strategi yang dilakukan dalam menangani masalah gizi adalah perbaikan gizi, terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra hamil, ibu hamil, bayi dan anak.

## 5. Program pengembangan lingkungan sehat

Target dan realisasi indikator kinerja program pengembangan lingkungan sehat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Program Pengemabnagan Lingkungan Sehat Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	75%	33.3%	44%
2	Persentase pekerjaan yang aman dan sehat bagi pekerja bagi masyarakat dan bagi lingkungan/  Persentase PKM yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	-  70%	-  77.21%	-  110.03%
	Persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	85%	48.77%	57%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Pada tahun 2017 capaian persentase PKM yang melaksanakan kesehatan kerja dasar di Provinsi Riau sebesar 41,78% dan tahun 2018 sebesar 77,21% dari target 70%. Secara provinsi indikator ini sudah mencapai target, namun ada 2 kab yang masih belum memenuhi target yaitu Kab. Kuantan Singing dan Kab. Indragiri Hulu. Persentase kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan pada tahun 2018 mencapai 53.83%. Hal ini tercapai karena kerjasama yang terpadu dari lintas program, lintas sektor dan stake holder kesehatan dalam menanamkan kesadaran kepada masyarakat, serta kerjasama yang komprehensif melaksanakan program dan kegiatan pembangunan edukasi kepada masyarakat, agar secara mandiri membangun sanitasi dasar, khususnya jamban sehat, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya. Tahun 2017 capaian persentase Jemaah haji yang diperiksa kebugaran haji adalah 31,43% (1581 orang dari 5030 jemaah haji). Capaian tahun 2018 sebesar 48,77%. Capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan Provinsi 85%, namun sudah mencapai target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar 40%. Pada tahun 2017 dan 2018 dalam pencapaian indikator ini hanya didukung oleh anggaran APBN.

## 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Target dan realisasi indikator program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Target Dan Realisasi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	47 per 100.000 pddk	11.3 per 100.000 pddk	12,4
2	Angka Kesakitan Penyakit Menular Malaria	0,1 per 1000 pddk	0.009 per 1000 pddk	0,011
3	Persentase ODHA yang pernah mengakses layanan ARV	87%	82,8 %	95.18%
	Persentase pengendalian penyakit tidak menular sesuai standar	80 %	70%	87.5
4	CNR semua kasus TB per 100.000 pddk	107 per 100.000 pddk	92 per 100.000 pddk	85/100.000 pddk

			pddk	
5	Persentase bayi usia < 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	93%	81.5%	82.3%
6	persentase desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunization)	85%	63.5%	75%
	Persentase situasi matra yang dilakukan pengelolaan kesehatan	40%	50%	125%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Pada tahun 2018 angka kesakitan penyakit menular belum mencapai target yang telah ditetapkan seperti TB Imunisasi Lengkap, Desa UCI. Dan untuk Penyakit DBD dan malaria menunjukkan adanya keberhasilan dalam penanganan penyakit tersebut. Hal ini dikarenakan kerjasama yang semakin baik antara semua stakeholder, utamanya dalam hal upaya pencegahan, melalui perbaikan faktor risiko yang menyebabkan timbulnya kerentanan dalam suatu populasi;memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) penyakit, memantapkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya KLB, serta penanggulangan pada saat KLB itu terjadi. Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan indikator dalam program imunisasi, dimana setiap bayi usia 0-11 bulan sudah mendapatkan imunisasi Hepatitis 1 kali, BCG 1 kali, DPT-HB-Hib 3 kali, Polio 4 kali, IPV 1 kali dan campak / measles rubella (MR) satu kali. Cakupan imunisasi dasar lengkap secara provinsi belum mencapai target dengan pencapaian hanya 81,5% (target 91%). Untuk pencapaian desa UCI menunjukkan terlindungnya bayi disuatu daerah dimana minimal 80% bayi suatu desa/kelurahan sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) berdasarkan cakupan HBO 1 kali, BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT-HB-Hib 3 kali dan campak 1 kali, UCI desa di Provinsi Riau tahun 2018 sebesar 63,5% sedikit meningkat dari tahun 2017 (62,6%) tetapi masih jauh dibawah target 85% atau mencapai 75%. Jumlah desa di Provinsi Riau tahun 2018 terdiri dari 1.873 desa dan yang mencapai UCI desa hanya 1.193 desa (63.5%).

Dalam KLB tahun 2018 terjadi 37 kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian tersebut tersebar pada 9 kab/kota. Hanya kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi tidak ada kasus KLB yang dilaporkan. Dari kejadian luar biasa tahun 2018 (10,8%) ditanggulangi dengan menggunakan dana APBN, dan 21,6% menggunakan dana APBD Provinsi dan 67,6% ditanggulangi dengan menggunakan dana APBD Kab/Kota. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kab/kota semakin mandiri dalam pengendalian KLB. Persentase KLB ditanggulangi < 24 jam mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini

disebabkan karena penyelenggaraan SKDR dilevel kab/kota dan puskesmas semakin membaik.

Persentase capaian kinerja situasi matra yang dilakukan pengelolaan kesehatan tahun 2018 sebesar 125% (target 40% dan realisasi 50%). Dan hal tersebut termasuk kategori persentase capaian sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 50%, maka persentase capaian sudah mencapai 100%.

## 7. Program standarisasi pelayanan kesehatan

**Tabel 2.8**  
**Target Dan Realisasi Program standarisasi pelayanan kesehatan Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase RS. Pemerintah yang terakreditasi (versi 2012 -17 RSUD Pemerintah, 5 RS. TNI/Polri/Dikti)	75%	13%	17.34
	Persentase Kec. Yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (166 Kec)	40%	-	

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

## 8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

**Tabel 2.9**  
**Target Dan Realisasi Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
	Persentase Sarana dan Prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung Akreditasi Rumah Sakit	83%	-	-

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

## 9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Target dan realisasi indikator kinerja Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 diukur dengan proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%)	Fasyankes 74% K4 76%	40,19% 65%	54,31 85.41%
	Angka Kematian bayi dan anak (per 1.000) diukur dengan proksi : Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)	KN 1 90%	65,31%	72.57

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

- **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Jumlah kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2018 adalah sebesar 104 jiwa (untuk angka kematian ibu digunakan adalah jumlah kematian yang dilaporkan). Faktor terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena perdarahan. Untuk menekan kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan, antara lain pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergisi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan kondisi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet tambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi kematian ibu. Penanganan kasus kematian ibu harus komprehensif dan bersinergi, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan kematian ibu. Capaian indikator kinerja sasaran berupa persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ante natal care (k4) berdasarkan data yang di rekapitulasi di Dinas Kesehatan Provinsi Riau sudah mencapai 85,41% dari target 76%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 cenderung stagnan dimana capaian K4 tahun 2017 : 85.37%.

- **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Untuk jumlah kematian bayi meski sudah mengalami penurunan akan tetapi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini salah satunya dikarenakan keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif

antara *stakeholder* kesehatan serta hadirnya tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan.

- Persalinan Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar

Persentase fasilitas kesehatan dasar/fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar pada tahun 2018 mencapai realisasi sebesar 40,19% dibandingkan targetnya. Hal tersebut dikarenakan upaya puskesmas dalam memenuhi standar akreditasi dan aturan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang mengamanatkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan primer selama 24 jam. Berdasarkan Permenkes No 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik pertama, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi, baru ditetapkan. Sehingga pada tahun 2015 puskesmas masih berada dalam taraf persiapan akreditasi, sementara di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi dalam tahap pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pendampingan akreditasi puskesmas. Untuk tahun 2017 sudah didapatkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran dari kab/kota terkait pelaksanaan akreditasi sehingga persentase fasilitas kesehatan dasar sesuai standar pada tahun 2018 ini meningkat dibanding tahun 2017.

## 10. Program Pelayanan Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan

Tabel 2.11  
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Program Pelayanan Instalasi Farmasi Dan Logistik Kesehatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Ketersediaan obat dan logistik kesehatan	97%	-	-

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

## 11. Program pengendalian penyakit tidak menular

Target dan realisasi program pengendalian penyakit tidak menular tahun 2018 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.12**  
**Target Dan Realisasi Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Pengendalian penyakit tidak menular sesuai standar	80%	33.4%	41.75%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Persentase fasyankes yang melaksanakan deteksi dan tata laksana dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi pada Tahun 2018 dengan realisasi sebesar 47,80% dibanding targetnya. Screening PTM harus lebih efektif lagi dilaksanakan seiring dengan meningkatnya frekuensi kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat.

## 12. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan

Target dan realisasi Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.13**  
**Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan analisis kesehatan)	90%	68,7 %	76.34
	Persentase RSUD Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	90%	33%	36.67

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.13 persentase Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan analisis kesehatan) adalah 68.7% dan Persentase RSUD Kab/Kota Kelas C yang memiliki

4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang adalah 33%. Persentase tenaga kesehatan ini akan semakin efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, jika terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan di seluruh wilayah Provinsi Riau yang meliputi 12 kabupaten/kota. Dalam upaya mewujudkan penyebaran tenaga kesehatan yang merata. Untuk adanya pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan ini perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda tentang tenaga kesehatan.

### 13. Program manajemen dan informasi kesehatan

Target dan realisasi program manajemen dan informasi kesehatan sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.14**  
**Target dan realisasi program manajemen dan informasi kesehatan**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
	Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	76%	100	100

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Hasil menunjukkan bahwa seluruh persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan telah tercapai sebesar , 100%. Untuk tahun 2019, realisasi indikator program masih dalam proses *Record Reporting*, dan sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

### 14. Program diklit dan penelitian kesehatan

Target dan realisasi program diklit dan penelitian kesehatan sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.15**  
**Target Dan Realisasi Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Tenaga kesehatan yang dilatih dengan kompetensi baik	95%	100	100
	Persentase Penelitian kesehatan yang dimanfaatkan	100%	100	100

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

## 15. Program penanggulangan krisis

Target dan realisasi program penanggulangan krisis sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.16**  
**Target Dan Realisasi Program Penanggulangan Krisis**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Krisis Kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100	100
	Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat	65%	-	-

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

## 16. Program pelayanan laboratorium klinis dan lingkungan

Target dan realisasi program pelayanan laboratorium klinis dan lingkungan sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.17**  
**Target Dan Realisasi Program Pelayanan Laboratorium Klinis Dan Lingkungan**

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinis dan Lingkungan Yang dilayani telah terakreditasi	Klinis 60% Lingkungan 100%	40 100	66.67 100

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Dalam pelaksanaan teknis laboratorium merupakan salah satu fasyankes yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dimana UPT laboratorium berfungsi untuk melakukan pemeriksaan klinis dan lingkungan. Pada tahun 2018 capaian realisasi melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 66,67% untuk pemeriksaan Laboratorium kesehatan klinis dan untuk capaian laboratorium kesehatan lingkungan yaitu 100%. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan diharapkan pemanfaatan UPT laboratorium ini bisa lebih baik lagi.

## 17. Program Pembiayaan Kesehatan

Target dan realisasi program pembiayaan kesehatan sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### 2.18 Target Dan Realisasi Program Pembiayaan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	(%)
1	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang mempunyai Jaminaan Kesehatan melalui JKN	80%	84.7%	106%

Sumber : Laporan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018

Pemanfaatan dana pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin tahun 2018 baik yaitu 106% dari target yang ditentukan yaitu 80%. Bila melihat pemanfaatan dana ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah menjadi peserta tetap di BPJS kesehatan.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai yang rata-rata 50-80%. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dilaksanakan dan kebijakan yang ditetapkan sudah tepat. Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi dan misi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dapat terealisasi. Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama yaitu pada realisasi tingkat pencapaiannya, namun demikian masih terdapat hal-hal yang belum optimal, diantaranya adalah :

1. Masih ada masyarakat yang belum masuk dalam pembiayaan kesehatan
2. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang seperti undang-undang
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sector kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Riau, senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat pengguna. Adapun peningkatan pelayanan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah :

1. Peningkatan standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pada pelayanan kesehatan yang ada di kab/kota
2. Peningkatan fasilitas pelayanan melalui pelayanan sesuai standar
3. Pengembangan system pelayanan yang berbasis teknologi informasi
4. Mendorong masyarakat untuk selalu hidup sehat.

Perencanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif dari suatu keadaan yang ada di wilayah. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencanaan mampu mengatasinya.

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan

perkembangan dan tantangan dewasa ini, permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah :

- 1) Angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2018 telah menjadi penurunan dibanding periode sebelumnya, walaupun secara target dapat Angka belum dapat di cantumkan.
- 2) Kurang optimalnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
- 3) Ancaman masalah kesehatan diakibatkan karena malnutrisi
- 4) Upaya pembebasan kasus jiwa yang dipasung.
- 5) Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T.C. 30

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Riau, **permasalahan** yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya institusi yang menciptakan lulusan tenaga kesehatan yang belum kompeten
- 2) Standarisasi dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang masih belum terpenuhi
- 3) Dukungan anggaran di kabupaten/kota dan provinsi masih banyak dimanfaatkan untuk kuratif dan rehabilitatif
- 4) Regionalisasi sistem rujukan kesehatan belum berjalan optimal
- 5) Regulasi di bidang kesehatan tingkat provinsi belum memadai
- 6) Dukungan pembangunan kesehatan dari lintas sektor belum optimal
- 7) Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover dalam penerima bantuan iuran (PBI) serta sistem koordinasi dan pelayanan dengan BPJS masih belum berjalan dengan baik
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana perawatan pasien jiwa
- 9) Angka kematian bayi masih belum memenuhi target
- 10) Masih dijumpainya kasus gizi buruk di beberapa kabupaten/kota
- 11) Peningkatan risiko penyakit tidak menular
- 12) Kurangnya program dan kegiatan yang di analisis responsif gender

Dari analisis pembangunan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, **maka isu strategis** yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah :

- 1) Masih cukup tingginya angka kematian bayi (AKB)
- 2) Lambatnya penurunan angka kematian ibu (AKI)

- 3) Belum optimalnya jumlah, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
- 4) Belum optimalnya penanganan masalah gizi
- 5) Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular, dan bencana
- 6) Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat
- 7) Masih tingginya kasus jiwa yang dipasung
- 8) Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 9) Masih belum optimalnya ketersediaan mutu, manfaat dan keamanan makanan, alkes dan obat-obatan
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan jaminan kesehatan

Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani, seperti upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, dan malaria, terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatiannya. Hal-hal tersebut, di antaranya yakni kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); penyalahgunaan narkotika dan alkohol; kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; asuransi kesehatan umum; dan kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan. Mengingat bahwa pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan. Guna mencapai kesuksesan dalam implementasi SDGs diperlukan internalisasinya ke dalam agenda pembangunan kesehatan nasional. Indikator-indikator SDGs perlu diselaraskan ke dalam visi misi Presiden dan seluruh Kepala Daerah, visi dan misi tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan melalui RPJMN, RPJMD serta Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Daerah. Bila kita dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah kita susun bersama maka dengan sendirinya target-target yang terdapat dalam SDGs akan dapat kita penuhi. Untuk mempersiapkan pembangunan kesehatan pada 2019 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau melalui Rakerkesda memaparkan delapan program baru Sustainable Development Goals (SDGs) untuk pencegahan atau promosi kesehatan Ada delapan *goals* sebenarnya yang



tercapai sebelumnya, seperti prevalensi malaria, penanggulangan tuberkulosis, dan akses air minum layak perkotaan. Selain itu, ada 17 indikator yang menunjukkan perkembangan positif, seperti penurunan balita kurang gizi, Angka Kematian Ibu Anak, dan sebagainya. Ke depan, *goals*-nya adalah meningkatkan kesejahteraan Sedangkan kedelapan perhatian baru mencakup:

1. Beban Ganda Gizi
2. Arah perbaikan gizi pada solusi berkelanjutan, yaitu integrasi dengan peningkatan akses pangan dan produksi pertanian
3. Kematian akibat penyakit tidak menular (hipertensi, stroke, diabetes, jantung, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya).
4. Penyalahgunaan narkotika dan alcohol
5. Kematian dan cedera kecelakaan lalu lintas
6. Universal Coverage Health
7. Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah
8. Penanganan krisis dan kegawatdaruratan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menambahkan pembangunan SDGs ke depan tidak hanya fokus pada aspek kesehatan saja, tetapi akan meluas pada akses sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di suatu daerah kita akan lakukan *mapping*, apakah tiga tahun berturut-turut dapat mengurangi kemiskinan, menuntaskan masalah kekurangan nutrisi, sanitasi.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebabkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, maka daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah meliputi, RPJPD, RPJMD, RKPD. RKPD Provinsi Riau ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah dimaksud khususnya dalam penentuan target kinerja program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana kabupaten/kota mempunyai peran yang sangat besar sehingga koordinasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Adanya perubahan yang mendasar dalam pendekatan penganggaran membutuhkan dukungan yang lebih responsif sehingga dapat memfasilitasi upaya pemenuhan tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Hasil rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2018 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun

2014-2019 perlu dilakukan koordiansi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan program kesehatan, sehingga identifikasi isu-isu strategis pembangunan Provinsi Riau dapat dicapai. Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
2. Dalam penyusunan Renja Berdasarkan hasil dari RKPD tahun 2020.
3. RKPD merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penentuan perubahan prioritas dan pagu anggaran sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Penetapan KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berdasarkan kondisi, fenomena, isu strategis yang terjadi di Provinsi Riau, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau. Menetapkan program prioritas pembangunan (*Common Goals*) dan kegiatan tematik untuk mensinergikan pembangunan yang bermutu dan akuntabel. Apabila kita banding dengan rancangan awal RKPD tahun 2020, maka program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengacu pada prioritas pembangunan yaitu meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan *good governance*. Di dalam prioritas pembangunan ada sasaran yang hendak dicapai adalah optimalisasi pengelolaan dan pengamanan asset daerah serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan tematik yang terdapat dalam prioritas pembangunan adalah profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. Berdasarkan hal-hal yang digariskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2020, penyusunan program/kegiatan diarahkan kepada program/kegiatan tersebut.

Disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan lintas sector terkait yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2020.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau berupa rancangan awal RKPD. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan terdapat perbedaan antara lain adanya kegiatan baru dan penambahan rancangan awal RKPD dengan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan SKPD terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Riau disajikan pada Tabel T-C. 31.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 diambil dari proses *bottom up planning dan top down planning* dengan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2020 dan rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh lintas Sektor Perangkat Daerah dan mitra kerja seluruh perangkat daerah yang berjumlah 12 kabupaten/kota dan rumah sakit swasta dan pemerintah kabupaten/kota, dan 40 perangkat daerah di Provinsi Riau. Sedangkan pada proses top downnya bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh peimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis teknologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam menerima pelayanan. Untuk itu kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi, sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan 2020 tercantum dalam tabel T-C. 32 sebagai berikut :

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan kesehatan seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke-4 (2014-2019) diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditujukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2020 dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas nasional serta program prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin kompleks dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demikratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan nasional. Berbagai program dan kegiatan strategis dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur Riau dan dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan acuan yang ada dalam Renstra dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum perangkat daerah melibatkan berbagai pihak dengan penyesuaian untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan prioritas pembangunan kesehatan tetap mengacu pada kondisi umum daerah yang dihadapi termasuk adanya masalah mendesak yang harus segera diatasi serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial.

Penyusunan Renja 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan acuan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020. Kondisi ini disebabkan dalam masa transisi dengan sudah berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Perencanaan pembangunan kesehatan diperlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas dan terarah, tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 adalah usulan program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi kebutuhan operasional ruti, memacu pencapaian target capaian kinerja dan pencapaian target Renstra, mencukupi belanja wajib/prioritas, penyesuaian terhadap program/kegiatan yang merupakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan sesuai visi dan misi yang ingin dicapai. Penetapan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka implementasi visi dan misi.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan khususnya bidang kesehatan dan membantu Gubernur Riau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan.

**Tabel. 3.1**

**Tujuan, Sasaran dan Target Renja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Tujuan /Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2020
1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas dan Morbiditas di Provinsi Riau	Meningkatnya upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit	Persentase penurunan dan terkendalinya kejadian penyakit	72%
		Meningkatnya pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	89%

### 3.3 Program Dan Kegiatan

#### a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor –faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah juga ada pertimbangan lainya seperti :

- Pencapaian standar pelayanan minimal
- Pengembangan daerah pariwisata
- Pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin
- Faktor parsial merupakan factor komitmen dari seluruh komponen perangkat daerah berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja, namun sumber daya yang cukup dan penghargaan (*reward*) tidak signifikan berpengaruh terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.



Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan melalui verifikasi awal rancangan awal RKPD tahun 2020, maka kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2020.

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah :

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pembiayaan Kesehatan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 5) Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
- 6) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2020 ada perubahan program dan kegiatan. Dimana pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Riau memiliki 22 program dan 144 kegiatan. Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 program/kegiatan pada berkurang menjadi 10 program dan 129 kegiatan. Penggabungan Program ini dikarenakan untuk mengefisienkan dalam pelaksanaan dalam mencapai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mendukung penurunan Kejadian Mortalitas dan Morbiditas di Provinsi Riau. Rincian program dan kegiatan tahun 2020 akan dicantumkan pada Tabel T-C.33

**c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2020.**

Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2014-2019 memiliki 27 program terdiri dari 5 program non urusan dan 22 program urusan. Dimana pada akhir tahun dari Renstra program dan kegiatan di lebur menjadi 10 program yang terdiri dari 3 program non urusan dan 7 program urusan. Dengan adanya peleburan beberapa program urusan dan non urusan dilihat dari sudut pandang sangat efisien akan tetapi tidak di dukung dengan

besaran anggaran yang diperuntukan pada program dan kegiatan-kegiatan yang ada pada RKPD tahun 2020. Hal ini bila dilihat dari prioritas program baik nasional dan daerah besaran dana yang di berikan tidak mendukung dari apa yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Secara analisis bila pemerintah daerah terlalu fokus terhadap pemberian layanan terhadap masyarakat miskin jadi untuk pelaksanaan program prioritas nasional bagaimana kedepannya. Bila kita harus bergantung dengan dana APBN maka tidak akan bisa mendukung pencapaian target pada tahun 2020. Akan tetapi kita harus tetap optimis bahwa dengan anggaran yang didapat kecil bila dibandingkan pada tahun ini, pemerintah daerah mengharapkan bisa berjalan dengan baik.

**d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.**

**Tabel T-C. 33**

**Tabel T-C. 31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020**  
**Provinsi Riau**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
					222.935.575.310					311.573.113.361	
	NON URUSAN				10.007.456.472	NON URUSAN				22.995.642.123	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	7.744.644.222	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	13.931.577.123	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 Surat	34.611.840	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 Surat	35.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	144 Rek	1.635.462.996	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	144 Rek	1.635.462.996	
3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	339.985.000	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	700.000.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	774.880.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	1.447.353.000	
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	109.444.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	160.000.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	161.198.280	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	171.198.280	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	190.714.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	200.000.000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	-	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	2.135.462.968	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	193.438.106	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	199.999.879	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	269.740.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	3.000.000.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kl	542.980.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kl	650.000.000	

12	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administasi kantor yang disediakan	100 ob	2.686.600.000	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administasi kantor yang disediakan	100 ob	2.786.600.000	
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 ob	805.590.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 ob	810.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>1.687.412.250</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>8.410.265.000</b>	
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan mobil dinas / operasional yang diadakan	1 unit	-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan mobil dinas / operasional yang diadakan	1 unit	500.000.000	
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	271 unit	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	271 unit	1.930.500.000	
16	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Provinsi Riau	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	1 Unit	-	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Provinsi Riau	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	1 Unit	50.000.000	
17	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	107 unit	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	107 unit	3.505.950.000	
18	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	901.212.250	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	635.000.000	
19	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	17 unit	375.700.000	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	17 unit	1.288.315.000	
20	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	107 Unit	410.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	107 Unit	500.500.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>100</b>	<b>575.400.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>100</b>	<b>653.800.000</b>	
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	245.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	280.000.000	
22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	80.400.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	93.800.000	
23	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	400 stel	-	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	400 stel	-	
24	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	250.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	280.000.000	
	<b>URUSAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>212.928.118.838</b>	<b>URUSAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>288.577.471.238</b>	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>2.406.967.300</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>9.928.000.000</b>	

			Angka Kematian Ibu diukur dengan Proxy : 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) 2. Kunjungan Antenatal (K4) (%) 3. Angka Kematian Bayi diukur dengan Proxy : Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap )  Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	80,00  92,00 92,00  25,00				Angka Kematian Ibu diukur dengan Proxy : 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) 2. Kunjungan Antenatal (K4) (%) 3. Angka Kematian Bayi diukur dengan Proxy : Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap )  Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	80,00  92,00 92,00  25,00			PAGU UNTUK PENURUNAN AKB DAN AKABA MASIH RENDAH
25	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	41 persen	108.516.600	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	46 persen	270.000.000		
26	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	65 persen	56.530.100	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	70 persen	280.000.000		
27	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	90 persen	46.882.700	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100 persen	150.000.000		
28	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	48 persen	386.000.000	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	52 persen	1.850.000.000		
29	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12 kab/kota	-	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12 kab/kota	2.400.000.000		
30	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	16 opd	-	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	19 opd	550.000.000		
31	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 kab/kota	50.000.000	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 kab/kota	250.000.000		
32	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan	20 persen	-	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan	25 persen	200.000.000		
33	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Provinsi Riau	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	150 pkm	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Provinsi Riau	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	170 pkm	350.000.000		
34	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	160 pkm	200.000.000	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	180 pkm	250.000.000		
35	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Provinsi Riau	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	60 anak sekolah	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Provinsi Riau	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	90 anak sekolah	250.000.000		
36	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60 kasus	185.000.000	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60 kasus	200.000.000		

37	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93 persen	600.000.000	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi pada balita dan masyarakat	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	94 persen	350.000.000
38	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	64 persen	98.734.600	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	66 persen	250.000.000
39	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36 org	88.999.700	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36 org	350.000.000
40	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	55 persen	-	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	60 persen	475.000.000
41	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1170 desa/kel	-	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1345 desa/kel	370.000.000
42	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	60 persen	72.423.400	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	62 persen	220.000.000
43	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	5 kab/kota	250.000.000	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	6 kab/kota	245.000.000
44	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	22 persen	63.880.200	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	24 persen	200.000.000
45	Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase status gizi balita berdasarkan	13 persen	200.000.000	Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase status gizi balita berdasarkan	12 persen	468.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>860.161 jiwa</b>	<b>189.036.386.450</b>	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>892.754 jiwa</b>	<b>204.138.699.991</b>
46	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraarn Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	85 persen	154.500.000	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraarn Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	88 persen	563.700.000
47	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100 persen	10.000.000.000	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100 persen	18.250.000.000
48	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 dok	-	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 dok	325.000.000
49	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam Program JKN	87 persen	178.881.886.450	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam Program JKN	87 persen	184.999.999.991
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>7.918.920.300</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>36.089.689.994</b>

			Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar	35 Persen				Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar	45 Persen		
			Persentase FKTP sesuai standar	100 Persen				Persentase FKTP sesuai standar	100 Persen		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau	100 Persen				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau	100 Persen		
			Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100 Persen				Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100 Persen		
			Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	60 Persen				Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	65 Persen		
50	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 persen	153.680.000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 persen	600.300.000	
51	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45 persen	173.000.000	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	48 persen	650.299.994	
52	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	41 persen	843.940.000	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	50 persen	1.200.000.000	
53	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100 persen	200.000.000	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100 persen	550.000.000	
54	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	85 persen	166.000.000	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	88 persen	600.000.000	
55	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	35 persen	68.012.000	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	45 persen	350.000.000	
56	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 persen	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 persen	700.000.000	
57	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	20 persen	110.984.700	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	25 persen	375.000.000	
58	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	45 persen	175.000.000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	50 persen	800.000.000	
59	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	45 persen	125.000.000	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	50 persen	440.000.000	
60	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	3 pkm	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	5 pkm	450.000.000	
61	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	85 persen	125.000.000	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	100 persen	480.000.000	

62	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	86.753.200	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	275.000.000
63	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	25 persen	122.764.000	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	35 persen	400.000.000
64	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	330.896.400	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	475.000.000
65	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	100 persen	175.000.000	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	100 persen	556.000.000
66	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis	50 persen	197.890.000	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	65 persen	757.000.000
67	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi	50 persen	449.000.000	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi	100 persen	4.833.000.000
68	Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	400.000.000	Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	1.100.000.000
69	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	100.000.000	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	650.000.000
70	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	100 persen	184.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	100 persen	860.000.000
71	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 persen	-	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 persen	275.000.000
72	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkatkan kapasitasnya	100 persen	-	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkatkan kapasitasnya	100 persen	300.000.000
73	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	-	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	630.000.000
74	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	-	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	350.000.000
75	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	720.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	1.200.000.000
76	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	-	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	270.000.000
77	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standard	45 persen	275.000.000	Pelayanan Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium lingkungan sesuai standard	50 persen	1.526.480.000



78	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	712.000.000	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	1.434.400.000	
79	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	-	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	3.960.390.000	
80	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	1.925.000.000	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	2.200.000.000	
81	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	-	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	6.841.820.000	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	23 persen	2.300.754.600	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	28 persen	8.753.860.000	
		Provinsi Riau	Success Rate TB Paru	90 persen			Provinsi Riau	Success Rate TB Paru	90 persen		
			Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk				Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk		
			Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	93 persen				Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	93 persen		
			Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	65 persen				Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	75 persen		
			Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60 persen				Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen		
			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60 persen				Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen		
82	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	23 persen	190.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	28 persen	210.000.000	
83	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	80 persen	84.680.000	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	90 persen	363.000.000	
84	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Provinsi Riau	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	90 persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Provinsi Riau	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	90 persen	363.130.000	
85	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	428.200.000	
86	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Provinsi Riau	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	70 persen	-	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Provinsi Riau	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	72 persen	190.000.000	

88	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	95 persen	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	100 persen	363.000.000
89	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	85 persen	158.986.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	90 persen	484.000.000
90	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	85 persen	106.520.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	90 persen	484.000.000
91	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD31 )	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu	50 persen	59.148.000	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD31 )	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	60 persen	181.500.000
92	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Provinsi Riau	Persentase desa/kelurahan UCI	88 persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Provinsi Riau	Persentase desa/kelurahan UCI	90 persen	484.000.000
93	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi	92 Persen	93.676.000	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	94 Persen	349.000.000
94	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 Persen	339.563.000	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 Persen	242.000.000
95	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	50 Persen	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	58 Persen	250.000.000
96	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Provinsi Riau	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	25 Persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Provinsi Riau	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	33 Persen	484.000.000
97	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	95 Persen	150.000.000	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	97 Persen	400.000.000
98	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Provinsi Riau	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	97 Persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Provinsi Riau	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	100 Persen	209.000.000
99	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	70 Persen	106.153.000	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	72 Persen	181.000.000
100	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 Persen	-	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 Persen	200.000.000
101	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR < 45 kasus per 100.000 pddk	66.446.600	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR < 44 per 100.000 pddk	459.500.000
102	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	70 Persen	45.911.600	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	80 Persen	160.150.000

103	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	46.828.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	152.750.000	
104	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Persentase eliminasi Hepatitis B	90 persen	51.052.600	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Persentase eliminasi Hepatitis B	100 persen	150.000.000	
105	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacangan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacang	77 persen	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacangan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacang	79 persen	170.000.000	
106	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	51.257.600	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	209.000.000	
107	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	60 persen	230.032.200	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	70 persen	752.590.000	
108	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	28 persen	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	32 persen	476.150.000	
109	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA		Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 laporan	-	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA		Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 laporan	357.890.000	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>		<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	<b>51 persen</b>	<b>3.249.580.088</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>		<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	<b>56 persen</b>	<b>12.932.820.000</b>	
			<b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>	<b>55 persen</b>				<b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>	<b>58 persen</b>		
			<b>Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik</b>	<b>60 persen</b>				<b>Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik</b>	<b>60 persen</b>		
110	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	65 persen	50.000.000	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	70 persen	165.000.000	
111	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	70 persen	110.000.000	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	75 persen	415.000.000	
112	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	83 persen	-	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	85 persen	165.000.000	
113	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) yang dibina sesuai standar	55 persen	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) yang dibina sesuai standar	60 persen	560.000.000	

114	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	87 persen	117.000.000	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	89 persen	450.000.000
115	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP, alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	84 persen	615.995.221	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP, alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	86 persen	2.000.000.000
116	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	84 persen	1.816.584.867	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	86 persen	7.505.990.000
117	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 persen	200.000.000	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 persen	854.400.000
118	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar		Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	100.000.000	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar		Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	517.750.000
119	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau		Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	80 persen	90.000.000	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau		Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	85 persen	299.680.000
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan</b>  <b>Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>  <b>Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar</b>	<b>72 persen</b>  <b>37 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>7.787.196.300</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan</b>  <b>Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>  <b>Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar</b>	<b>74 persen</b>  <b>39 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>12.948.901.253</b>
110	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 persen	-	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 persen	110.817.000
111	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	1 dok	55.000.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	12 dok	273.000.000
112	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Riau	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	50.000.000	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Riau	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	128.447.550
113	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	80.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	333.900.000
114	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, nnds/nddes)	Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	95 persen	124.016.300	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, nnds/nddes)	Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	144 persen	500.000.000

115	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	5.907.180.000	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	5.907.180.000	
118	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkan pelatihan Sesuai Standar	61 persen	150.000.000	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkan pelatihan Sesuai Standar	61 persen	1.143.985.920	
119	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	32 persen	850.000.000	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	32 persen	2.549.450.000	
122	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	-	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	222.270.783	
125	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	540 org	521.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	540 org	1.620.850.000	
126	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	50.000.000	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	159.000.000	
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	<b>65 Persen</b>	<b>228.313.800</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	<b>67 Persen</b>	<b>3.785.500.000</b>	
127	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	228.313.800	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	285.500.000	PAGU TIDAK SESUAI TERLALU RENDAH DARI TAHUN SEBELUMNYA
128	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Provinsi Riau	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	100 persen	-	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Provinsi Riau	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	100 persen	3.500.000.000	

Pekanbaru, Juli 2019





























**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiran Maju Tahun 2021**  
**Provinsi Riau**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1.1.02.01.1.1.02	KESEHATAN				222.935.575.310			311.573.113.361	
1.1.02.01.0.0.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu		100	7.744.644.222	APBD		100	13.931.577.123
1.1.02.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Provinsi Riau	1500 Surat	34.611.840	APBD		1500 Surat	35.500.000
1.1.02.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Provinsi Riau	144 Rek	1.635.462.996	APBD		144 Rek	1.635.462.996
1.1.02.01.0.0.00.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Riau	6 Unit	339.985.000	APBD		6 Unit	700.000.000
1.1.02.01.0.0.00.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi Riau	12 bln	774.880.000	APBD		12 bln	1.447.353.000
1.1.02.01.0.0.00.01.005	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	Provinsi Riau	200 unit	109.444.000	APBD		200 unit	160.000.000
1.1.02.01.0.0.00.01.006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Provinsi Riau	50 jenis	161.198.280	APBD		50 jenis	171.198.280
1.1.02.01.0.0.00.01.007	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Provinsi Riau	25 jenis	190.714.000	APBD		25 jenis	200.000.000
1.1.02.01.0.0.00.01.008	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Provinsi Riau	10 jenis	-	APBD		10 jenis	2.135.462.968
1.1.02.01.0.0.00.01.009	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Provinsi Riau	10 jenis	193.438.106	APBD		10 jenis	199.999.879

1.1.02.01.0.0.00.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Provinsi Riau	5500	porsi	269.740.000	APBD		5500	porsi	3.000.000.000
1.1.02.01.0.0.00.01.011	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	12	kl	542.980.000	APBD		12	kl	650.000.000
1.1.02.01.0.0.00.01.012	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administasi kantor yang disediakan	Provinsi Riau	100	ob	2.686.600.000	APBD		100	ob	2.786.600.000
1.1.02.01.0.0.00.01.013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Provinsi Riau	14	ob	805.590.000	APBD		14	ob	810.000.000
<b>1.1.02.01.0.0.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>100</b>		<b>1.687.412.250</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>		<b>8.410.265.000</b>
1.1.02.01.0.0.00.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan mobil dinas / operasional yang diadakan	Provinsi Riau	1	unit	-	APBD		1	unit	500.000.000
1.1.02.01.0.0.00.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Provinsi Riau	271	unit	-	APBD		271	unit	1.930.500.000
1.1.02.01.0.0.00.02.008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Provinsi Riau	1	Unit	-	APBD		1	Unit	50.000.000
1.1.02.01.0.0.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Provinsi Riau	107	unit	-	APBD		107	unit	3.505.950.000
1.1.02.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Provinsi Riau	30	ruang	901.212.250	APBD		30	ruang	635.000.000
1.1.02.01.0.0.00.02.014	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	Provinsi Riau	17	unit	375.700.000	APBD		17	unit	1.288.315.000
1.1.02.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Provinsi Riau	107	Unit	410.500.000	APBD		107	Unit	500.500.000
<b>1.1.02.01.0.0.00.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>100</b>		<b>575.400.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>		<b>653.800.000</b>
1.1.02.01.0.0.00.03.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Provinsi Riau	350	stel	245.000.000	APBD		350	stel	280.000.000
1.1.02.01.0.0.00.03.002	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Provinsi Riau	134	stel	80.400.000	APBD		134	stel	93.800.000
1.1.02.01.0.0.00.03.003	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Provinsi Riau	350	stel	250.000.000	APBD		350	stel	280.000.000

1.1.02.01.1.1.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian pelayanan penunjang klinik dan non klinik Rumah sakit Arifin Achmad		87	Persen	2.406.967.300	APBD	Pagu untuk penurunan AKB dan AKABA masih rendah dibandingkan dengan pagu dana pada program pelayanan kesehatan	90	Persen	9.928.000.000
		Persalinan di Fasyankes Kesehatan		80	Persen		APBD		85	Persen	
		Kunjungan Antenatal (K4)		92	Persen		APBD		94	Persen	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita)		22,80	Persen				20,50	Persen	
		Persentase capaian pelayanan penunjang klinik dan non klinik rumah sakit petala bumi		40	Persen				50	Persen	
		Persentase Capaian pelayanan penunjang klinik dan non klinik Rumah sakit Jiwa Tampan		53	Persen				60	Persen	
		Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)		92	Persen			94	Persen		
1.1.02.01.1.1.02.15.023	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	Provinsi Riau	41	persen	108.516.600	APBD		46	persen	270.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.024	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di	Provinsi Riau	65	persen	56.530.100	APBD		70	persen	280.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.025	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Provinsi Riau	90	persen	46.882.700	APBD		100	persen	150.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.027	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Persentase Capaian UKBM Aktif	Provinsi Riau	48	persen	386.000.000	APBD		52	persen	1.850.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.029	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	Provinsi Riau	12	kab/kota		APBD		12	kab/kota	2.400.000.000

1.1.02.01.1.1.02.15.030	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	Provinsi Riau	16 opd		APBD		19 opd	550.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.034	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Kab/Kota yang meningkatkan capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	Provinsi Riau	12 kab/kota	50.000.000	APBD		12 kab/kota	250.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.036	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Persenstase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu	Provinsi Riau	20 persen		APBD		25 persen	200.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.038	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	Provinsi Riau	150 pkm		APBD		170 pkm	350.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.039	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	Provinsi Riau	160 pkm	200.000.000	APBD		180 pkm	250.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.040	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	Provinsi Riau	60 anak sekolah		APBD		90 anak sekolah	250.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.042	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	Provinsi Riau	60 kasus	185.000.000	APBD		60 kasus	200.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.043	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	Provinsi Riau	93 persen	600.000.000	APBD		94 persen	350.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.044	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Provinsi Riau	64 persen	98.734.600	APBD		66 persen	250.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.045	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selama	Provinsi Riau	36 org	88.999.700	APBD		36 org	350.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.048	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	50 persen		APBD		60 persen	475.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.049	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	Provinsi Riau	1170 desa/kel		APBD		1345 desa/kel	370.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.050	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Provinsi Riau	60 persen	72.423.400	APBD		62 persen	220.000.000

1.1.02.01.1.1.02.15.051	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Provinsi Riau	5 kab/kota	250.000.000	APBD		6 kab/kota	245.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.052	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Provinsi Riau	34 persen	63.880.200	APBD		24 persen	200.000.000
1.1.02.01.1.1.02.15.054	Surveilans Gizi	Persentase status gizi balita berdasarkan	Provinsi Riau	13 persen	200.000.000	APBD		12 persen	468.000.000
<b>1.1.02.01.1.1.02.16</b>	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>100 Persen</b>	<b>189.036.386.450</b>	APBD		<b>100 Persen</b>	<b>204.138.699.991</b>
1.1.02.01.1.1.02.16.001	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraarn Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	Provinsi Riau	80 persen	154.500.000	APBD		88 persen	563.700.000
1.1.02.01.1.1.02.16.002	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan	Provinsi Riau	100 persen	10.000.000.000	APBD		100 persen	18.250.000.000
1.1.02.01.1.1.02.16.003	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	Provinsi Riau	1 dok		APBD		1 dok	325.000.000
1.1.02.01.1.1.02.16.004	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam IKN	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	Provinsi Riau	87 persen	178.881.886.450	APBD		87 persen	184.999.999.991
<b>1.1.02.01.1.1.02.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar Persentase FKTP sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan bagi Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan Persentase kepuasan pelanggan atas pelayan laboratorium</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>35 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 60 Persen</b>	<b>7.918.920.300</b>			<b>45 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 65 Persen</b>	<b>36.089.689.994</b>
1.1.02.01.1.1.02.17.001	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi Riau	45 persen	153.680.000	<b>APBD</b>		50 persen	600.300.000

1.1.02.01.1.1.02.17.002	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	Provinsi Riau	45 persen	173.000.000	APBD		48 persen	650.299.994
1.1.02.01.1.1.02.17.003	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan ke gawatdaruratannya	Provinsi Riau	41 persen	843.940.000	APBD		50 persen	1.200.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.004	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	Provinsi Riau	100 persen	200.000.000	APBD		100 persen	550.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.005	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	Provinsi Riau	85 persen	166.000.000	APBD		88 persen	600.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.006	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	Provinsi Riau	35 persen	68.012.000	APBD		45 persen	350.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.007	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	100.000.000	APBD		100 persen	700.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.008	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	Provinsi Riau	20 persen	110.984.700	APBD		25 persen	375.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.009	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	Provinsi Riau	45 persen	175.000.000	APBD		50 persen	800.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.010	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) di Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	Provinsi Riau	45 persen	125.000.000	APBD		50 persen	440.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.011	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah	Provinsi Riau	3 pkm	-	APBD		5 pkm	450.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.012	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	Provinsi Riau	85 persen	125.000.000	APBD		100 persen	480.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.013	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	Provinsi Riau	100 persen	86.753.200	APBD		100 persen	275.000.000

1.1.02.01.1.1.02.17.014	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	Provinsi Riau	25 persen	122.764.000	APBD		35 persen	400.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.015	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	330.896.400	APBD		100 persen	475.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.016	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	Provinsi Riau	100 persen	175.000.000	APBD		100 persen	556.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.017	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis	Provinsi Riau	50 persen	197.890.000	APBD		65 persen	757.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.018	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	50 persen	449.000.000	APBD		100 persen	4.833.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.019	Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( RAKERKESDA)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	Provinsi Riau	1 dok	400.000.000	APBD		1 dok	1.100.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.020	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	Provinsi Riau	2 dok	100.000.000	APBD		2 dok	650.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.021	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	100 persen	184.000.000	APBD		100 persen	860.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.022	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan	Provinsi Riau	13 persen	-	APBD		13 persen	275.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.023	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD		100 persen	300.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.024	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD		100 persen	630.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.025	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	80 persen	-	APBD		80 persen	350.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.026	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	720.000.000	APBD		100 persen	1.200.000.000

1.1.02.01.1.1.02.17.027	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	Provinsi Riau	85 persen	-	APBD		85 persen	270.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.029	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi	Provinsi Riau	45 persen	275.000.000	APBD		50 persen	1.526.480.000
1.1.02.01.1.1.02.17.030	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	712.000.000	APBD		100 persen	1.434.400.000
1.1.02.01.1.1.02.17.031	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD		100 persen	3.960.390.000
1.1.02.01.1.1.02.17.032	Pemenuhan ketersediaan bahan regensia pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	1.925.000.000	APBD		100 persen	2.200.000.000
1.1.02.01.1.1.02.17.033	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	Provinsi Riau	100 persen	-	APBD		1 persen	6.841.820.000
1.1.02.01.1.1.02.18	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	Persentase ODHA yang diobati	Provinsi Riau	23 persen	2.300.754.600	APBD		28 persen	8.753.860.000
		Success Rate TB Paru	Provinsi Riau	90 persen		APBD		90 persen	
		Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk		< 1 / 1000 penduduk		APBD		< 1 / 1000 penduduk	
		Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan		93 persen		APBD		93 persen	
		Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%		100 persen		APBD		100 persen	
		Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		60 persen		APBD		70 persen	
Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		60 persen	APBD		70 persen				



1.1.02.01.1.1.02.18.001	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	Provinsi Riau	23	persen	190.500.000	APBD		28	persen	210.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.002	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	Provinsi Riau	80	persen	84.680.000	APBD		90	persen	363.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.003	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	Provinsi Riau	90	persen	-	APBD		90	persen	363.130.000
1.1.02.01.1.1.02.18.004	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Succes Rate TB	Provinsi Riau	90	persen	200.000.000	APBD		90	persen	428.200.000
1.1.02.01.1.1.02.18.005	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	Provinsi Riau	70	persen	-	APBD		72	persen	190.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.007	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	Provinsi Riau	95	persen	110.000.000	APBD		100	persen	363.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.008	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	Provinsi Riau	85	persen	158.986.000	APBD		90	persen	484.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.009	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	85	persen	106.520.000	APBD		90	persen	484.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.010	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD3I )	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	Provinsi Riau	50	persen	59.148.000	APBD		60	persen	181.500.000
1.1.02.01.1.1.02.18.011	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Persentase desa/kelurahan UCI	Provinsi Riau	88	persen	-	APBD		90	persen	484.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.014	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	Provinsi Riau	92	Persen	93.676.000	APBD		94	Persen	349.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.015	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	Provinsi Riau	100	Persen	339.563.000	APBD		100	Persen	242.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.016	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	Provinsi Riau	50	Persen	50.000.000	APBD		58	Persen	250.000.000

1.1.02.01.1.1.02.18.017	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	Provinsi Riau	25	Persen		APBD		33	Persen	484.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.018	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	Provinsi Riau	95	Persen	150.000.000	APBD		97	Persen	400.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.019	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Provinsi Riau	97	Persen		APBD		100	Persen	209.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.020	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	Provinsi Riau	70	Persen	106.153.000	APBD		72	Persen	181.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.021	Pengendalian Kasus Zoonosis	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	Provinsi Riau	100	Persen		APBD		100	Persen	200.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.022	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	Provinsi Riau	IR < 45 per 100.000 pddk	kasus	66.446.600	APBD		IR < 44 per 100.000 pddk	kasus	459.500.000
1.1.02.01.1.1.02.18.023	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTRS	Provinsi Riau	70	Persen	45.911.600	APBD		80	Persen	160.150.000
1.1.02.01.1.1.02.18.024	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	Provinsi Riau	100	persen	46.828.000	APBD		100	persen	152.750.000
1.1.02.01.1.1.02.18.025	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Persentase eliminasi Hepatitis B	Provinsi Riau	90	persen	51.052.600	APBD		100	persen	150.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.026	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	Provinsi Riau	77	persen	50.000.000	APBD		79	persen	170.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.027	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	Provinsi Riau	100	persen	51.257.600	APBD		100	persen	209.000.000
1.1.02.01.1.1.02.18.028	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	Provinsi Riau	60	persen	230.032.200	APBD		70	persen	752.590.000
1.1.02.01.1.1.02.18.029	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	Provinsi Riau	28	persen	110.000.000	APBD		32	persen	476.150.000
1.1.02.01.1.1.02.18.030	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA	Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza		3	laporan		APBD		3	laporan	357.890.000

1.1.02.01.1.1.02.19	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>	<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b> <b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>  <b>Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik</b>		<b>51 persen</b>	<b>3.249.580.088</b>	APBD		<b>56 persen</b>	<b>12.932.820.000</b>
				<b>55 persen</b>		APBD		<b>58 persen</b>	
				<b>60 persen</b>		APBD		<b>60 persen</b>	
1.1.02.01.1.1.02.19.001	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	Provinsi Riau	65 persen	50.000.000	APBD		70 persen	165.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.002	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	Provinsi Riau	70 persen	110.000.000	APBD		75 persen	415.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.003	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas	Provinsi Riau	83 persen	-	APBD		85 persen	165.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.004	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan	Provinsi Riau	55 persen	150.000.000	APBD		60 persen	560.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.006	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	Provinsi Riau	87 persen	117.000.000	APBD		89 persen	450.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.007	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Provinsi Riau	84 persen	615.995.221	APBD		86 persen	2.000.000.000
1.1.02.01.1.1.02.19.008	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	84 persen	1.816.584.867	APBD		86 persen	7.505.990.000
1.1.02.01.1.1.02.19.009	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	1 persen	200.000.000	APBD		1 persen	854.400.000

1.1.02.01.1.1.02.19.010	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar		100	persen	100.000.000	APBD		100	persen	517.750.000
1.1.02.01.1.1.02.19.011	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIETT		80	persen	90.000.000	APBD		85	persen	299.680.000
<b>1.1.02.01.1.1.02.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan</b>  <b>Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>  <b>Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar</b>		<b>72</b>	<b>persen</b>	<b>7.787.196.300</b>	APBD		<b>74</b>	<b>persen</b>	<b>12.948.901.253</b>
				<b>37</b>	<b>persen</b>		APBD		<b>39</b>	<b>persen</b>	
				<b>100</b>	<b>persen</b>		APBD		<b>100</b>	<b>persen</b>	
1.1.02.01.1.1.02.20.001	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	Provinsi Riau	100	persen		APBD		100	persen	110.817.000
1.1.02.01.1.1.02.20.002	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	1	dok	55.000.000	APBD		12	dok	273.000.000
1.1.02.01.1.1.02.20.003	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	Provinsi Riau	100	persen	50.000.000	APBD		100	persen	128.447.550
1.1.02.01.1.1.02.20.004	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	Provinsi Riau	100	persen	80.000.000	APBD		100	persen	333.900.000
1.1.02.01.1.1.02.20.005	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, pnds/pndgs)	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	Provinsi Riau	95	persen	124.016.300	APBD		144	persen	500.000.000
1.1.02.01.1.1.02.20.006	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	Provinsi Riau	191	org	5.907.180.000	APBD		191	org	5.907.180.000
1.1.02.01.1.1.02.20.008	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkan pelatihan Sesuai Standar	Provinsi Riau	61	persen	150.000.000	APBD		61	persen	1.143.985.920

1.1.02.01.1.1.02.20.009	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	Provinsi Riau	32	persen	850.000.000	APBD		32	persen	2.549.450.000
1.1.02.01.1.1.02.20.012	Evaluasi Pasca Pelatihan yang dilaksanakan UPT Bapelkes	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	Provinsi Riau	60	persen		APBD		60	persen	222.270.783
1.1.02.01.1.1.02.20.015	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	Provinsi Riau	540	org	521.000.000	APBD		540	org	1.620.850.000
1.1.02.01.1.1.02.20.016	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	Provinsi Riau	2	buku	50.000.000	APBD		2	buku	159.000.000
<b>1.1.02.01.1.1.02.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>		<b>65</b>	<b>Persen</b>	<b>228.313.800</b>	APBD		<b>67</b>	<b>Persen</b>	<b>3.785.500.000</b>
1.1.02.01.1.1.02.21.002	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	Provinsi Riau	100	persen	228.313.800	APBD		100	persen	285.500.000
1.1.02.01.1.1.02.21.003	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	Provinsi Riau	100	persen		APBD		100	persen	3.500.000.000

Pekanbaru, Agustus 2019





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 telah selesai masa berlakunya, serta RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam tahap penyusunan. Berdasarkan ketentuan penyusunan rencana program dan kegiatan pada RKD Provinsi Riau Tahun 2020 lebih diarahka pada program-program prioritas daerah dan pencapaian target-target indikator kinerja yang ada pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025, dan dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 tersaji dalam lampiran.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2020**

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur			Target	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1.1.02.01.1.1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>											<b>222.935.575.310,00</b>		<b>311.572.513.361,00</b>
<b>1.1.02.01.0.0.00.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			Provinsi Riau	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 Persen</b>						<b>7.744.644.222,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>13.930.977.123,00</b>
1.1.02.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat menyurat			PKU			Jumlah Surat yang Dikirim	1500 Surat	Jumlah surat yang dikirim	1500 surat		34.611.840,00	1500 Surat	35.500.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Provinsi Riau			Jumlah rekening yang dibayar	144 Rekening	Jumlah rekening yang dibayar	144 Rekening		1.635.462.996,00	144 Rekening	1.635.462.996,00
1.1.02.01.0.0.00.01.003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Provinsi Riau			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 unit		339.985.000,00	6 Unit	700.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Provinsi Riau			Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Kebersihan kantor terlaksana dengan baik	12 bulan		774.880.000,00	12 Bulan	1.447.353.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.005	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Provinsi Riau			Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 Unit	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit		109.444.000,00	200 Unit	160.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.007	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Provinsi Riau			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 Jenis	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	500 jenis		161.198.280,00	50 Jenis	171.198.280,00
1.1.02.01.0.0.00.01.008	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan			Provinsi Riau			Jumlah jenis laporan yang dicetak dan diandakan	25 Jenis	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan diandakan	25 Jenis		190.714.000,00	25 Jenis	200.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Riau			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis		-	10 Jenis	2.135.462.968,00
1.1.02.01.0.0.00.01.009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Provinsi Riau			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis		193.438.106,00	10 Jenis	199.999.879,00
1.1.02.01.0.0.00.01.010	Penyediaan Makan dan Minuman			Provinsi Riau			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	5500 Porsi	disediakan	5500 Porsi		269.740.000,00	5500 Porsi	3.000.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Provinsi Riau			Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Kali	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Kali		542.980.000,00	12 Kali	650.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor			Provinsi Riau			Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	100 OB	Tenaga administrasi kantor yang diperkerjakan	100 OB		2.686.600.000,00	100 OB	2.786.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.01.013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Provinsi Riau			Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 OH/23 ob	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan		805.590.000,00	14 OH	810.000.000,00
<b>1.1.02.01.0.0.00.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>			Provinsi Riau	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 Persen</b>						<b>1.687.412.250,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8.410.265.000,00</b>
1.1.02.01.0.0.00.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional			Provinsi Riau			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit				-	1 Unit	500.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Provinsi Riau			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	271 Unit				-	271 Unit	1.930.500.000,00
1.1.02.01.0.0.00.02.008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Provinsi Riau			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	1 Unit	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas yang diadakan	1 Keg		-	1 Unit	50.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Provinsi Riau			Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	107 Unit				-	107 Unit	3.505.950.000,00
1.1.02.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Provinsi Riau			Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 Ruang	Mengurangi tingkat kerusakan gedung	Gedung Kantor Dinkes dan UPT		901.212.250,00	30 Ruang	635.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.02.014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pku			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Unit		375.700.000,00	17 Unit	1.288.315.000,00
1.1.02.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pku			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	107 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	107 Unit		410.500.000,00	107 Unit	500.500.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur	Target				
1.1.02.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Apartur			Provinsi Riau	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100 Persen					575.400.000,00		100 Persen	653.800.000,00
1.1.02.01.0.0.00.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Provinsi Riau			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	350 Stel	245.000.000,00		350 Stel	280.000.000,00
1.1.02.01.0.0.00.03.002	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Provinsi Riau			Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	134 Stel / 108 stel	Jumlah SATPAM dan CS yang mendapatkan pakaian kerja harian	108 stel	80.400.000,00		134 Stel	93.800.000,00
1.1.02.01.0.0.00.03.003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Provinsi Riau			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	350 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	350 Stel	250.000.000,00		350 Stel	280.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat			Provinsi Riau	Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik Rumah Sakit Arifin Achmad; Persalinan di Fasilitas Kesehatan; Kunjungan Antenatal (K4); Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik Rumah Sakit Petala Bumi; Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik Rumah Sakit Jiwa Tampam; Kunjungan Neonatal	87 Persen; 80 Persen; 92 Persen; 22.80 Persen; 40 Persen; 53 Persen; 92 Persen;					2.406.967.300,00		90 Persen; 85 Persen; 94 Persen; 20.50 Persen; 50 Persen; 60 Persen; 94 Persen;	9.928.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.023	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes			Provinsi Riau			Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	41 Persen	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	12 kab/kota	108.516.600,00		46 Persen	270.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.024	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes			Provinsi Riau			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	65 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan kesehatan	12 Kab/Kota	56.530.100,00		70 Persen	280.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.025	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes			Provinsi Riau			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	90 Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan kesehatan kerja dasar pada fasyankes	12 kab/kota	46.882.700,00		100 Persen	150.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.027	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat			Provinsi Riau			Persentase Capaian UKBM Aktif	48 Persen	Jumlah Kabupaten / Kota Yang melaksanakan UKBM Aktif	12 kab/kota	386.000.000,00		52 Persen	1.850.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.029	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan			Provinsi Riau , Kab Bengkalis dan Kab Siak			Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan "	12 Kab/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang berawasan Kesehatan	3 Kebijakan	-		12 Kab/Kota	2.400.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.030	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat			12 Kab/Kota di Provinsi Riau			Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	16 OPD	Jumlah Kebijakan Publik yang berawasan Kesehatan	3 Kebijakan	-		19 OPD	550.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.15.034	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar			Provinsi Riau			Kab/Kota yang meningkatkan capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 Kab/Kota	Kab/Kota yang meningkatkan capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 Kab/Kota	50.000.000,00		12 Kab/Kota	250.000.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
					Program/Outcome		Kegiatan/Output			Hasil Kegiatan		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target		Tolak Ukur	Target			
1.1.02.01.1.1.02.15.036	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia			Provinsi Riau			Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu	20 Persen	Yang Memenuhi Standar		-	25 Persen	200.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.038	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			Provinsi Riau			Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	150 Puskesmas			-	170 Puskesmas	350.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.039	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )			Provinsi Riau			Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	160 Puskesmas	Jumlah kab/kota yang memberikan Pembinaan ibu hamil memenuhi standar (ANC Terintegrasi)	12 kab/kota	200.000.000,00	180 Puskesmas	250.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.040	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah			Provinsi Riau			Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	60 Anak Sekolah			-	90 Anak Sekolah	250.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.042	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi			Provinsi Riau			Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60 Kasus	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan validasi Kasus Kematian neonatus dan bayi	12 kab/kota	185.000.000,00	60 Kasus	200.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.043	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting			Provinsi Riau			Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93 Persen	1. Persentase Gizi Buruk Balita 2. Persentase Balita Pendek dan sangat pendek (stunting) 3. Persentase Gizi Kurang Balita (underweight BB/U) 4. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan 5. Persentase Balita Kurus (wasting) yang mendapat makanan tambahan 6. Persentase desa yang mengkonsumsi garam yodium	1. 1.48 2. 26.98 % 3. 8.48 % 4. 100% 5. 86 % 6. 93.8 %	600.000.000,00	94 Persen	350.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.044	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri			Provinsi Riau			Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	64 Persen	1. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan TTD 2. Persentase Rematri mendapat TTD 3. Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	1. 88 2. 28.3 3. 75	98.734.600,00	66 Persen	250.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.045	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi			Provinsi Riau			"Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi "	36 Orang	1. Jumlah kecamatan bebas rawan gizi 2. Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerja SDM Pengelola Gizi	1. 87 % 2. 24 orang	88.999.700,00	36 Orang	350.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.048	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas			Provinsi Riau			Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	50 Persen			-	60 Persen	475.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.049	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM			Provinsi Riau			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1170 Desa/Kel			-	1345 Desa/Kel	370.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.050	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)			Provinsi Riau			Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	60 Persen	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	12 kab/kota	72.423.400,00	62 Persen	220.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target			Tolak Ukur	Target		
1.1.02.01.1.1.02.15.051	Pengembangan wilayah pemukiman sehat			Provinsi Riau			Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	5 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kabupaten Kota Sehat di Provinsi Riau	6 Kab/Kota	250.000.000,00	5 Kab/Kota	245.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.052	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)			Provinsi Riau			Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	34 Persen / 22 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan pada TPM	12 kab/kota	63.880.200,00	24 Persen	200.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.15.054	Surveilans Gizi						Persentase status gizi balita berdasarkan indeks	13 Persen	Status Gizi Balita berdasarkan Indeks menurut Kab/Kota (BB/U dan TB/U)	BB/U= 8,95 % TB/U= 16,75 %	200.000.000,00	12 Persen	468.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.16	<b>Program Pembiayaan Kesehatan</b>			Provinsi Riau	<b>Persentase Masyarakat Miskin yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>100 Persen</b>					<b>189.036.386.450,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>204.138.699.991,00</b>	
1.1.02.01.1.1.02.16.001	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan			Provinsi Riau			Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	80 Persen	Terlaksananya dukungan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau	100 Persen	154.500.000,00	88 Persen	563.700.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.16.002	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu			Provinsi Riau			Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	90 Persen	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI Non PBI yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan.	100 Persen	10.000.000.000,00	100 Persen	18.250.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.16.003	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau			Provinsi Riau			Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 Dok			-	1 Dok	325.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.16.004	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam JKN			Provinsi Riau			Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah ke dalam Program JKN	87 Persen	Bagian Tolak Ukur Tidak Disi sama sekali		178.881.886.450,00	90 Persen	184.999.999.991,00	
1.1.02.01.1.1.02.17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>			Provinsi Riau	<b>Persentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar; Persentase FKTP sesuai standar; Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana; Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan; Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium;</b>	<b>35 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 60 Persen;</b>					<b>7.918.920.300,00</b>	<b>45 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 65 Persen;</b>	<b>36.089.689.994,00</b>	
1.1.02.01.1.1.02.17.001	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 Persen	Persentase Rumah Sakit Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar di Provinsi Riau	50 persen	153.680.000,00	50 Persen	600.300.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.002	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase Kab/Kota yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45 Persen	Persentase Rumah Sakit Yang Melaksanakan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan Sesuai Standar di Provinsi Riau	45 Persen	173.000.000,00	48 Persen	650.299.994,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.003	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119			Provinsi Riau			Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	41 Persen	Persentase Kab/Kota Yang Telah Memberikan Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Kepada Masyarakat	45 persen	843.940.000,00	50 Persen	1.200.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur					Target
1.1.02.01.1.1.02.17.004	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100 Persen	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Oleh BPRS	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	550.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.005	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	85 Persen	Persentase RS pemerintah dan swasta yang telah memenuhi syarat akreditasi SNARS	85 Persen	166.000.000,00	88 Persen	600.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.006	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	35 Persen	Terlayannya Masyarakat Sesuai Standar Mutu	100 Persen	68.012.000,00	45 Persen	350.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.007	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 Persen	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang sesuai standar	100 Persen	100.000.000,00	100 Persen	700.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.008	Pembinaan Laboratorium di FKTP			Provinsi Riau			Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	20 Persen	Persentase Terlaksananya Pelayanan Laboratorium Sesuai Standar	20 Persen	110.984.700,00	25 Persen	375.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.009	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi			Provinsi Riau			Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	45 Persen	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	45 Persen	175.000.000,00	50 Persen	800.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.010	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	45 Persen	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang Melaksanakan Perkesmas sesuai standar	45 Persen	125.000.000,00	50 Persen	440.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.011	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata			Provinsi Riau			Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	3 Puskesmas			-	5 Puskesmas	450.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.012	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	85 Persen	Persentase Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar mutu	85 Persen	125.000.000,00	100 Persen	480.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.013	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau			provinsi riau			Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 Persen	Persentase FKTP Teregistrasi dan Memiliki Perizinan	100 Persen	86.753.200,00	100 Persen	275.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.014	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau			provinsi riau			Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	25 Persen	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	25 persen	122.764.000,00	35 Persen	400.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.015	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau			provinsi riau			Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 Persen	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 Persen	330.896.400,00	100 Persen	475.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.016	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau			provinsi Riau			Persentase pelaksanaan management krisis kesehatan	100 Persen	Jumlah Jiwa yang tertanggulangi permasalahan kesehatan	100 Persen	175.000.000,00	100 Persen	556.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.017	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau			provinsi riau			Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	50 Persen	Persentase SDM Puskesmas Kab/Kota rawan bencana yang telah di latih penanggulangan krisis kesehatan	50 persen	197.890.000,00	65 Persen	757.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur	Target				
1.1.02.01.1.1.02.17.018	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau			provinsi riau		Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan krisis kesehatan Provinsi	25 Persen	Termanfaatkannya peralatan pengadaan penanggulangan krisis kesehatan	1 keg	449.000.000,00		100 Persen	4.833.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.019	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)			Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 Dok	400.000.000,00		1 Dokumen	1.100.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.020	Pembinaan Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD			Provinsi Riau		Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 Dok	100.000.000,00		2 Dokumen	650.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.021	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau			Provinsi Riau		Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	100 Persen	Persentase kab/ kota yang terpantau dan terevaluasi capaian program kesehatan provinsi riau	100 Persen	184.000.000,00		100 Persen	860.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.022	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau			Provinsi Riau		Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kot	13 Dokumen			-		13 Dokumen	275.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.023	Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan			Provinsi Riau		Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100 Persen			-		100 Persen	300.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.024	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan			Provinsi Riau		Persentase Kab/Kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 Persen			-		100 Persen	630.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.025	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan			Provinsi Riau		Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 Persen			-		80 Persen	350.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.026	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)			Provinsi Riau		Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 Persen	Persentase Kabupaten/ Kota menggunakan layanan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 Persen	720.000.000,00		100 Persen	1.200.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.027	Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau			Provinsi Riau		Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 Persen			-		85 Persen	270.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.029	Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium Klinis dan Lingkungan			Provinsi Riau		Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar	45 Persen	Persentase SDM Laboratorium Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Sesuai Rencana	80 Persen	275.000.000,00		50 Persen	1.526.480.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.030	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Reagensia Pelayanan Laboratorium Klinis			provinsi riau		Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 Persen	Persentase Ketersediaan Bahan Reagensia Pelayanan Klinis Sesuai Standar	100 Persen	712.000.000,00		100 Persen	1.434.400.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.031	Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayanan Laboratorium Klinis			provinsi riau		Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 Persen			-		100 Persen	3.960.390.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.17.032	Pemenuhan Ketersediaan Bahan Reagensia Pelayanan Laboratorium Lingkungan			provinsi riau		Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 Persen	Persentase Ketersediaan Bahan Reagensia Pelayanan Lingkungan Sesuai Standar	100 Persen	1.925.000.000,00		100 Persen	2.200.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur					Target
1.1.02.01.1.1.02.17.033	Pemenuhan Ketersediaan Alat-Alat Pelayan Laboratorium Lingkungan						Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan lingkungan sesuai standar	100 Persen			-	100 Persen	6.841.820.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati; 23 Persen; Success Rate TB Paru; Annual Parasit Indeks (API) : Persentase capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 0-11 bulan; Persentase Kab/Kota yang merespon Alert sinyal kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) > 80%; Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90 Persen; <1 / 1000 penduduk Kasus; 93 Persen; 100 Persen; 60 Persen; 60 Persen;				2.300.754.600,00		28 Persen; 90 Persen; < 1 / 1000 penduduk Kasus; 93 Persen; 100 Persen; 70 Persen; 70 Persen;	8.753.860.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.001	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS			Provinsi Riau			Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	23 Persen	Persentase ODHA terobati sesuai standar	100	190.500.000,00	28 Persen	210.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.002	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS			Provinsi Riau			Persentase bumul yang diperiksa syphilis dan diobati	80 Persen	Persentase bumul yang diperiksa syphilis sesuai standar	80 Persen	84.680.000,00	90 Persen	363.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.003	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB			Provinsi Riau			Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	90 Persen			-	90 Persen	363.130.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.004	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB			Provinsi Riau			Succes Rate TB	90 Persen	Persentase Kab/Kota dengan Penderita TB Paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standart	100	200.000.000,00	90 Persen	428.200.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.005	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M			Provinsi Riau			Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	70 Persen			-	72 Persen	190.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.007	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria			Provinsi Riau			Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	95 Persen	Pengobatan kasus malaria sesuai standar	95 Persen	110.000.000,00	100 Persen	363.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.008	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar			Provinsi Riau			Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	85 Persen	Persentase Terbinanya dan terawasinya program imunisasi dasar	100 persen	158.986.000,00	90 Persen	484.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.009	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan			Provinsi Riau			Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	70 Persen	Persentase Terbinanya dan terawasinya program imunisasi lanjutan	100 Persen	106.520.000,00	90 Persen	484.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.010	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD3I )			Provinsi Riau			Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	50 Persen	Persentase Pencapaian target antara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun disuatu wilayah tertentu 2) Discarded/ Eliminasi	50 Persen	59.148.000,00	60 Persen	181.500.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.011	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI			Provinsi Riau			Persentase desa/keurahan UCI	88 Persen			-	90 Persen	484.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.014	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji			Provinsi Riau			Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	92 Persen	Persentase Jemaah Yang diperiksa Kesehatan	100 Persen	93.676.000,00	94 Persen	349.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.015	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarbasi Haji Riau			Provinsi Riau			Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarbasi Haji	100 Persen	Jumlah Jemaah Haji yang dilayani di Embarkasi dan Debarbasi	5359 org	339.563.000,00	100 Persen	242.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur	Target				
1.1.02.01.1.1.02.18.016	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan			Provinsi Riau		Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	50 Persen	Jumlah kab/kota yang melakukan pemetaan surveilans terpadu penyakit	12 kab/kota	50.000.000,00		58 Persen	250.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.017	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra			Provinsi Riau		Persentase situasi matra (minimal 2 situasi matra) di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	25 Persen			-		33 Persen	484.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.018	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB			Provinsi Riau		Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	95 Persen	Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 95%	100 persen	150.000.000,00		97 Persen	400.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.019	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta			Provinsi Riau		Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	97 Persen	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacat	100 Persen	-		100 Persen	209.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.020	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang			Provinsi Riau		Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	70 Persen	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang	70 Persen	106.153.000,00		72 Persen	181.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.021	Pengendalian Kasus Zoonosis			Provinsi Riau		Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 Persen			-		100 Persen	200.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.022	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD			Provinsi Riau		Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	45 IR <per 100.000 pdkk	Jumlah Kab/Kota yang Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD 45 IR < Per 100.000 penduduk	12 Kab/Kota	66.446.600,00		44 IR < 45 IR < per 100.000 pdkk	459.500.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.023	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA			Provinsi Riau		Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	70 Persen	Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia Balita melalui program MTBS	70 Persen	45.911.600,00		80 Persen	160.150.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.024	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare			Provinsi Riau		Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 Persen	Persentase kasus diare yang diobati	100 Persen	46.828.000,00		100 Persen	152.750.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.025	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus			Provinsi Riau		Persentase eliminasi Hepatitis B	90 Persen	Persentase Kab/Kota dengan Eliminasi Hepatitis B	100 Persen	51.052.600,00		100 Persen	150.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.026	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan			Provinsi Riau		Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	77 Persen	Reduksi Kecacingan < 10 %	< 10 persen	50.000.000,00		79 Persen	170.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.027	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia			Provinsi Riau		Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 Persen	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	100 Persen	51.257.600,00		100 Persen	209.000.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.18.028	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )			Provinsi Riau		Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	60 Persen	a. Persentase Penduduk usia 15 - 59 tahun yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai Standar; b. Persentase Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar; c. Persentase Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar; d. Persentase tidak adanya anggota keluarga yang merokok;	100 persen	230.032.200,00		70 Persen	752.590.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
					Program/Outcome		Kegiatan/Output				Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target			Tolak Ukur	Target		
1.1.02.01.1.1.02.18.029	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA			Provinsi Riau			Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	21 Persen		a. Persentase orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; b. Persentase FKTP yang melaksanakan tata Laksana ODGJ sesuai Standar.		110.000.000,00	32 Persen	476.150.000,00
1.1.02.01.1.1.02.18.030	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA						Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 Laporan			-		3 Laporan	357.890.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.	Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes			Rumah Sakit dan Puskesmas dengan IPWL ( Institusi Penerima Wajib Lapo) se Provinsi Riau	Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar; Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik ;	51 Persen; 55 Persen; 98 Presen;					3.249.580.088,00		56 Persen; 58 Persen; 99 Persen;	12.932.820.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.001	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau			Puskesmas, Rumah Sakit di Provinsi Riau			Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	65 Persen		Persentase terpantaunya kasus penggunaan obat dan penyalahgunaan NAPZ	65 Persen	50.000.000,00	70 Persen	165.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.002	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau			Provinsi			Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	70 Persen		Persentase penggunaan obat rasional dan pelayanan kefarmasian di Provinsi Riau	80 persen	110.000.000,00	75 Persen	415.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.003	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar			Provinsi Riau ( sarana produksi dan			Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	83 Persen				-	85 Persen	165.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.004	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ), makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau			IFLK Kab/Kota di Provinsi Riau			Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT) yang dibina sesuai standar	55 Persen		Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alkes dan PKRT yang melakukan melaksanakan CDOB,CDAKB,CDPKRTB, CPOTB di Provinsi Riau	55 Persen	150.000.000,00	60 Persen	560.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.006	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau			IFLLK Kab/Kota Provinsi Riau			Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	87 Persen		Persentase Kab/Kota mempunyai instalasi farmasi terpenuhi perbekalan kesehatan dan alkes yang sesuai standar	100 persen	117.000.000,00	89 Persen	450.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.007	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program			Provinsi Riau			Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	84 Persen		Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan BMHP dan Alkes Bufferstock sesuai standar di Propinsi Riau	100 persen	615.995.221,00	86 Persen	2.000.000.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.008	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau			Provinsi Riau			Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	84 Persen		Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan obat buffer stock dan obat program untuk pelayanan kesehatan diatas 80%	100 persen	1.816.584.867,00	86 Persen	7.505.990.000,00
1.1.02.01.1.1.02.19.009	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau			Provinsi Riau			Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 Dokumen		Persentase Kab/Kota mempunyai Dokumen Rencana Kebutuhan Obat, Vaksin dan Logistik Kesehatan di Provinsi Riau	100 persen	200.000.000,00	1 Dokumen	854.400.000,00



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur					Target
1.1.02.01.1.1.02.19.010	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar			IFLK Kab/Kota se Provinsi Riau	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standa	100 Persen	Persentase Kab/Kota memiliki IFK dengan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	100.000.000,00		100 Persen	517.750.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.19.011	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau				Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	80 Persen	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan input sistem Aplikasi SIFIT sesuai prosedur	80 Persen	90.000.000,00		85 Persen	299.680.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.	<b>Program Pengembangan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan</b>			Provinsi Riau	<b>Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar; Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar ;</b>	<b>100 Persen; 45 Persen;</b>			<b>7.787.196.300,00</b>		<b>100 Persen; 60 Persen;</b>	<b>12.948.901.253,00</b>		
1.1.02.01.1.1.02.20.001	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Provinsi	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 Persen			-		100 Persen	110.817.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.002	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data rebut, ns, wkds)			pekanbaru ( Provinsi Riau)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	1 Dok	Persentase Kab/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	100 Persen	55.000.000,00		1 Dok	273.000.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.003	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan			Faskes di Kab/Kota	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 Persen	Persentase ASN yang lulus uji kompetensi 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan	100 Persen	50.000.000,00		100 Persen	128.447.550,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.004	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan			Kab/Kota di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 Persen	Persentase tenaga kesehatan internsip yang memenuhi standar	100 Persen	80.000.000,00		100 Persen	333.900.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.005	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, nabel, nads/mndos)			Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	95 Org	Persentase SDM kesehatan yang dibina memenuhi standar	100 Persen	124.016.300,00		144 Org	500.000.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.006	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau			Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 Orang	Jumlah Paramedis PTT yang dikontrak	189 org	5.907.180.000,00		191 Orang	5.907.180.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.008	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES			provinsi riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	15 Org	Jumlah SDM UPT. Bapelkes yang mendapatkan Pelatihan sesuai standar dan termanfaatkan untuk meningkatkan kinerja UPT. Bapelkes	15 Org	150.000.000,00		61 Org	1.143.985.920,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.009	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES			provinsi riau	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	27 Persen	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar dan termanfaatkan sesuai dengan Standar Akreditasi Institusi	100 Persen	850.000.000,00		34 Persen	2.549.450.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.012	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes			provinsi riau	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 Persen			-		60 Persen	222.270.783,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.015	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan			Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	90 Org	Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih sesuai standar dan menerapkan hasil pelatihan ssi standar	90 org	521.000.000,00		540 Org	1.620.850.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.20.016	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan				Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 Buku	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar dan dimanfaatkan untuk pelatihan	2 buku	50.000.000,00		2 Buku	159.000.000,00		
1.1.02.01.1.1.02.21.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan</b>			kab/kota provinsi Riau	<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	<b>65 Persen</b>			<b>228.313.800,00</b>		<b>67 Persen</b>	<b>3.785.500.000,00</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output		Hasil Kegiatan			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
					Uraian	Target	Uraian	Target	Tolak Ukur	Target				
1.1.02.01.1.1.02.21.002	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau			Pku			Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 Persen	Persentase Usulan Pembiayaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai standar dan terverifikasi	100	228.313.800,00	100 Persen	285.500.000,00	
1.1.02.01.1.1.02.21.003	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang						Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	100 Persen			-	100 Persen	3.500.000.000,00	
<b>J U M L A H</b>											<b>222.935.575.310,00</b>		<b>311.572.513.361,00</b>	

Pekanbaru, Agustus 2019



























## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Dari **10** program dan **129** kegiatan yang menjadi prioritas dalam kegiatan 2020 ini adalah :

- a. Permasalahan kesehatan yang dihadapi di Indonesia cukup beragam termasuk di Provinsi Riau
- b. Untuk masalah eliminasi TB kita harus terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus TBC yang lebih serius. Terutama pada kasus yang belum terdeteksi yang ada di Provinsi Riau
- c. Untuk kasus **STUNTING** atau masalah gizi buruk diakuinya memang dapat disebabkan banyak factor. Tidak hanya kurangnya asupan gizi, termasuk pula menurutnya factor lingkungan, seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan budaya. Dengan melakukan intervensi spesifikasi gizi pada remaja, ibu hamil dan bayi. Serta intervensi sensitive gizi seperti peningkatan ekonomi keluarga, program akses air bersih, dan sanitasi.
- d. Imunisasi sangat penting karena mutu dan kualitas vaksin yang ada serta kekuatan surveilans setiap PKM agar informasi lebih akurat.

#### **1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di dalam Renja Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Renja Dinas Kesehatan tahun 2020, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang

- b) Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator SPM dan SDGs. Oleh sebab itu, seluruh elemen kesehatan untuk bekerja lebih fokus untuk mencapainya.
- c) Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.
- d) Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBD/DAK dan APBN. dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya [RPJMN, RPJMD, RKPD dan RENSTRA Dinas]
- e) Renja Dinas Kesehatan tahun 2020, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

### 1.3. Rencana tindak lanjut

Dari analisis kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019 berdasarkan indikator SPM. Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan petugas kesehatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan
- b) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kebutuhan termasuk pengelolaan kesehatan yang berbasis IT.
- c) Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset
- d) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pekanbaru, Agustus 2019







Evaluasi Hasil Renja  
Dinas Kesehatan Provinsi Riau  
Periode Pelaksanaan Tahun 2018

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
0	0		Non Urusan																									
0	0		NON URUSAN																									
1	0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik																									
0.0	00 001	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	13900 surat	142.330.000	4.500	34.036.773	4.700	57.500.000	1.175	0	783	0	0	4.982.500	979	6.403.000	2.937	11.385.500	62,49	19,80	7.437	45.422.273	53,50	31,91		
0.0	00 001	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 bulan	5.622.462.100	36	1.988.156.336	12	1.526.730.333	3	0	3	453.087.674	3	388.595.580	1	372.695.427	10	1.214.378.681	83,33	79,54	46	3.202.535.017	76,67	56,96		
0.0	00 001	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang	60 unit	1.868.250.000	3.669	811.563.750	6	298.380.000	2	0	0	0	0	4.250.000	1	65.590.000	3	69.840.000	50,00	23,41	3.672	881.403.750	6,120	47,18		
0.0	00 001	000 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional/ operasional yang	60 unit	1.840.120.000	24	514.076.154	9	677.355.500	0,09	0	0,94	20.853.700	7,47	2.767.000	3,60	243.699.000	12,10	267.319.700	134,44	39,47	36,10	781.395.854	60,17	42,46		
0.0	00 001	000 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	2.044.667.000	2.524	960.123.950	12	443.820.000	3	0	3	42.240.000	3	250.640.125	3	60.320.000	12	353.200.125	100,00	79,58	2.536	1.313.324.075	4.226,67	64,23		
0.0	00 001	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	1.400.130.000	29	955.437.734	12	169.682.400	3	0	3	0	6	168.108.000	0	0	12	168.108.000	100,00	99,07	41	1.123.545.734	68,33	80,25		
0.0	00 001	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	665.400.000	29	338.209.800	12	159.045.250	0	0	0	0	0	0	0	10	107.091.300	10	107.091.300	83,33	67,33	39	445.301.100	65	66,92	
0.0	00 001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	60 bulan	1.185.020.000	36	874.781.446	12	259.160.000	3	0	3	15.840.000	3	21.024.000	3	119.006.800	12	155.870.800	100,00	60,14	48	1.030.652.246	80	86,97		
0.0	00 001	015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	60 bulan	318.880.000	36	207.810.000	12	112.000.000	3	0	3	0	3	17.390.000	0	8.085.000	9	25.475.000	75,00	22,75	45	233.285.000	75	73,16		
0.0	00 001	017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	23000 porsi	1.165.560.000	8.012	438.557.891	5.500	248.600.000	0	0	0	2.352	85.118.000	1.485	83.882.000	3.837	169.000.000	69,76	67,98	11.849	607.557.891	51,52	52,13			
0.0	00 001	018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	725 kali	2.612.990.000	296	1.407.791.080	145	599.990.000	15	0	34	135.817.500	96	125.982.650	0	180.206.600	145	442.006.750	100,00	73,67	441	1.849.797.830	60,83	70,79		
0.0	00 001	019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor Dinas Kesehatan	60 Unit	1.082.979.000	25	578.661.000	12	251.810.000	3	0	3	57.600.000	3	96.000.000	3	76.800.000	12	230.400.000	100,00	91,50	37	809.061.000	61,67	74,71		
0.0	00 001	048	Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi	Persentase informasi kesehatan yang terpublikasi sesuai target	500 %	1.765.130.000	85	252.719.300	100	420.000.000	0	0	11	29.373.400	24	70.975.800	43,24	68.964.100	78,24	169.313.300	78,24	40,31	163,24	422.032.600	32,65	23,91		
0.0	00 001	197	Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan Bantuan	Persentase dokumen bantuan keuangan, bantuan hibah dan	0 %	0	11	225.448.400	100	287.264.000	1,86	0	0	0	39,10	29.769.500	0	27.481.950	40,96	57.251.450	40,96	19,93	51,96	282.699.850	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				84,11	56,03			788	55,11			
Predikat Kinerja																				Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah			
2	0 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang																									
0.0	00 002	000 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0 Unit	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
0.0	00 002	000 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 unit	7.663.300.000	522	2.096.583.550	384	4.765.877.500	11	0	75	187.429.200	43	158.000.000	107	645.430.000	236	990.859.200	61,46	20,79	758	3.087.442.750	3.790	40,29		
0.0	00 002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 unit	8.929.719.000	7	4.117.951.488	1	3.394.197.100	0,16	0	0	0,07	228.582.000	0,01	65.679.000	0,24	294.261.000	24,00	8,67	7,24	4.412.212.488	144,80	49,41			
0.0	00 002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	5 Unit	2.587.540.000	3	1.563.181.000	1	579.480.000	0,25	0	0	0,01	14.000.000	0,74	200.297.000	1	214.297.000	100,00	36,98	4	1.777.478.000	80	68,69			
0.0	00 002	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	517.830.000	3	212.357.500	1	111.500.000	0,25	0	0,17	0	0	0,58	85.314.000	1	85.314.000	100,00	76,51	4	297.671.500	80	57,48			
0.0	00 002	034	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1778 unit	1.012.300.000	630	519.196.000	384	192.000.000	96	0	0	0	1	159	63.157.000	256	63.157.000	66,67	32,89	886	582.353.000	49,83	57,53			
0.0	00 002	120	Rehab Sedang Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	0 Unit	0	2	2.351.775.400	2	4.281.990.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	2.351.775.400	0	0			
0.0	00 002	144	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset	Jumlah genset yang dipelihara	5 unit	380.100.000	5.001	82.779.996	1	149.000.000	0,25	0	0	0	0	0,35	88.500.000	0,60	88.500.000	60,00	59,40	5.001,6	171.279.996	100,032	45,06			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				51,52	29,41			13022,1	39,81			
Predikat Kinerja																				Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
3	0 0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur																									
0.0	00 003	000 6	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Frekuensi Pegawai Dinkes Prov. Riau yang dibina fisik dan	1210 Orang	1.213.620.000	530	336.415.000	200	226.050.000	50	0	11	0	4	55.715.000	16	100.210.000	81	155.925.000	40,50	68,98	611	492.340.000	50,50	40,57		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				40,5	68,98			50,5	40,57			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sedang			Rendah	Sangat Rendah			
4	0 0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara																									
0.0	00 005	000 1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	136 orang	1.677.050.000	50	297.736.990	30	374.850.000	7,50	0	0	0	0,50	15.199.000	0	69.844.500	8	85.043.500	26,67	22,69	58	382.780.490	42,65	22,82		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				26,67	22,69			42,65	22,82			
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2018)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100%	14 = 6+12	15 = 14/5x100	16	17															
5	0006028	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan penyampaian laporan	5	1	668.417.000	3	288.993.550	1	136.854.000	0	0,10	13.200.000	0,13	17.600.000	0,30	21.924.200	0,53	52.724.200	53,00	38,53	3,53	341.717.750	70,60	51,12						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												53	38,53			70,6	51,12														
Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah														
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN																															
6	10215	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan																												
1.0	02	15	019	Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan	57	Kab/Kota	774.180.000	31	402.883.679	10	160.268.000	0	0	0	0,44	0	0,26	9.600.000	0,70	9.600.000	7,00	5,99	31,70	412.483.679	55,61	53,28				
1.0	02	15	020	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Penyediaan NAPZA	Jumlah RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap	266	RS dan IPWL	788.020.000	59	136.139.500	45	214.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	59	136.139.500	22,18	17,28				
1.0	02	15	021	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat	Jumlah sarana distribusi obat, alkes, kosmetik, makanan minuman dan	0	sarana	204.601.400	11	204.601.400	270	264.019.000	130	0	0	0	55.532.500	53	54.613.700	0	0	183	110.146.200	67,78	41,72	194	314.747.600	0	0		
1.0	02	15	022	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penguasaan Obat Rasional	Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasyankes Dasar	375	%	2.288.240.000	174,62	560.735.425	80	825.000.000	0	2	3.600.000	0,80	3.180.000	6	49.800.000	8,80	56.580.000	11,00	6,86	183,42	617.315.425	48,91	26,98				
1.0	02	15	024	Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di Provinsi Riau	Persentase PIRT yang melakukan cara produksi pangan rumah tangga	325	%	796.380.000	12	74.732.000	70	216.596.000	35	0	25	100.923.100	3	10.130.000	0	0	63	111.053.100	90,00	51,27	75	185.785.100	23,08	23,33			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												35,16	21,17			29,96	24,17														
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
7	10216	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar Rasio Temporal																												
1.0	02	16	031	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase RSUD Kab/Kota Milik Pemerintah yang melaksanakan	177	%	2.357.870.000	12	625.519.100	38	428.588.500	8,50	0	10	0	77.824.958	0	0	18,50	77.824.958	48,68	18,16	30,50	703.344.058	17,23	29,83				
1.0	02	16	059	Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan program pendukung	177	%	2.357.870.000	10	1.168.875.185	38	716.888.000	0	6	49.786.800	6,50	408.671.000	4,31	485.201.966	16,81	943.659.766	44,24	131,63	26,81	2.112.534.951	15,15	89,60				
1.0	02	16	062	Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Perobatan Tradisional (SP3T)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan	177	%	2.475.330.000	12	710.903.100	38	621.145.000	0	1	10.950.000	2,28	151.212.500	0	52.624.200	23	214.786.700	60,53	34,58	35	925.689.800	19,77	37,40				
1.0	02	16	066	Pemantauan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED	Persentase Puskesmas yang mampu PONED	177	%	1.701.130.000	137	509.197.600	38	462.292.500	0	0	2,28	0	3,80	7.000.000	6,08	7.000.000	16,00	1,51	143,08	516.197.600	80,84	30,34					
1.0	02	16	078	Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas sesuai	0	0	0	0	38	269.478.000	0	0	2	9.500.000	6	9.600.000	8,68	22.510.000	16,68	41.610.000	43,89	15,44	16,68	41.610.000	0	0				
1.0	02	16	079	Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 jenis	177	%	1.046.705.000	0	326.384.750	38	219.909.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	326.384.750	0	31,18				
1.0	02	16	080	Peningkatan Pelayanan Laboratorium di FKTP Tingkat Provinsi	Persentase laboratorium kesehatan dasar sesuai standar	0	0	0	0	38	457.448.500	0	0	0	17	9.750.000	0	1.665.000	17	11.415.000	44,74	2,50	17	11.415.000	0	0					
1.0	02	16	081	Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas Yang telah melaksanakan manajemen	177	%	1.317.260.000	0	466.776.750	38	513.786.400	0	4	44.515.400	13	112.608.800	10,30	33.180.000	27,30	190.304.200	71,84	37,04	27,30	657.080.950	15,42	49,88				
1.0	02	16	082	Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi	Persentase Kecamatan Minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (166	215	%	1.701.930.000	0	60,24	561.728.200	5,40	0	0	43.431.000	25,58	11.975.100	0	63.795.000	30,98	119.201.100	51,43	21,22	30,98	119.201.100	14,41	7,00				
1.0	02	16	084	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan Medis Tingkat	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang	150	%	2.933.970.000	0	0	35	652.777.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												38,14	26,21			16,28	27,52														
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
8	10219	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (Prilaku Hidup																												
1.0	02	19	022	Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kabupaten dan Kota yang meningkatkan kinerja Promkes	60	kab/kota	6.206.050.000	11	2.263.107.100	12	2.193.600.500	0	2	255.971.900	0	33.207.000	3	289.178.900	25,00	13,18	14	2.552.286.000	23,33	41,13						
1.0	02	19	023	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan	60	kab/kota	14.417.900.000	36	4.125.835.824	12	4.590.743.600	0	1	184.057.051	1	233.468.200	3	417.525.251	25,00	9,09	39	4.543.361.075	65	31,51						
1.0	02	19	025	Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan	Jumlah dokumen penguatan Kebijakan Publik Berwawasan	15	dokumen	571.628.000	2	228.912.970	3	126.967.900	0	0	0	0	2.400.000	1	2.400.000	33,33	1,89	3	231.312.970	20	40,47						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												27,78	8,06			36,11	37,7														
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
9	10220	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk balita																												
1.0	02	20	009	Penanggulangan masalah gizi	Jumlah kab/kota yang menyoalakan penanggulangan	60	kab/kota	1.601.840.000	9	383.374.470	12	305.804.000	0	1	26.799.000	3	48.252.500	0	0	4	75.051.500	33,33	24,54	13	458.425.970	21,67	28,62				
1.0	02	20	015	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang terpantau status gizi masyarakat	60	kab/kota	1.955.390.000	36	721.597.000	12	221.761.000	0	0	2	7.200.000	0	0	2	7.200.000	16,67	3,25	38	728.797.000	63,33	37,27					
1.0	02	20	016	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah pengelola gizi yang meningkat kinerja SDM pengelola	0	kab/kota	0	11	360.274.900	12	833.741.000	0	1	59.511.400	1	84.480.500	6	158.864.400	8	302.856.300	66,67	36,32	19	663.131.200	0	0				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												38,89	21,37			28,33	21,96														
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah														
10	10221	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas yang berkualitas																												
1.0	02	21	0006	Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas	Persentase penduduk yang menggunakan sarana air minum	207	%	1.352.670.000	76	428.221.240	12	321.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	76	428.221.240	36,71	31,66					







No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun (2015 s/d 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi(2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
				5		6			7		8		9		10				11		12=8+9+10+11				13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.0	02	40	000	Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling	5 Paket	9.349.000.000	3	3.152.469.110	1	2.219.000.000	0	0	0	0	0,08	0	0	127.888.055	0,08	127.888.055	8,00	5,76	3,08	3.280.357.165	61,60	35,09				
1.0	02	40	000	Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling	5 paket	8.033.290.000	13	4.838.150.220	5	1.255.295.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13	4.838.150.220	260	60,23			
1.0	02	40	000	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling	Jumlah personil yang terlatih dalam rangka pelayanan UPT Labkesling	20 Orang	2.240.110.000	14	620.999.590	14	706.513.000	0	0	2	109.945.343	0,72	126.101.120	6,70	61.685.500	9,42	297.731.963	67,29	42,14	23,42	918.731.553	117,10	41,01			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																35,37	27,74			127,98	45,92									
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
22	1	2	41	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase Masyarakat Miskin dan tak mampu mempunyai jaminan																									
1.0	02	41	000	Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Jaminan	0 %	0	75	294.371.000	80	930.456.600	21,76	0	0,24	35.849.800	12,15	7.725.000	28,92	449.257.453	63,07	492.832.253	78,84	52,97	138,07	787.203.253	0	0			
1.0	02	41	000	Penyediaan Biaya Jamkesda	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu diluar kuota Penerima	375 %	277.910.570.000	31	148.238.859.061	80	21.186.944.400	25,26	0	0	343.605.882	23,63	10.562.982.311	30,26	8.649.177.060	79,15	19.555.765.253	98,94	92,30	110,15	167.794.624.314	29,37	60,38			
1.0	02	41	000	Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan	Persentase kab/kota melaksanakan manajemen pembiayaan kesehatan	375 %	1.495.470.000	59	351.476.912	80	412.280.000	26,30	0	0	36.382.000	16,89	73.517.500	3,92	24.491.900	47,11	134.391.400	58,89	32,60	106,11	485.868.312	28,30	32,49			
1.0	02	41	000	Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	5 Dokumen	1.530.210.000	3	353.748.327	1	531.000.000	0	0,02	0	0,63	28.127.000	0	16.864.300	0,65	44.991.300	65,00	8,47	3,65	398.739.627	73	26,06				
1.0	02	41	000	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki	persentase Masyarakat Miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki	380 %	150.244.780.000	146,40	67.087.843.841	80	65.233.939.000	0	0	0	42,99	26.875.692.200	36,68	27.749.953.500	79,67	54.625.645.700	99,59	83,74	226,07	121.713.489.541	59,49	81,01				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																80,25	54,02			38,03	39,99									
Predikat Kinerja																Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 22)																46,24	32,59			779,32	49,02									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 22)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah									

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -  
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -  
Tindak Lanjut Yang Di Perluakan Dalam Triwulan Berikutnya : -  
Tindak Lanjut Yang Di Perluakan Dalam Renja PD Berikutnya : -

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Dra. HJ. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM  
Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19660717 199102 2 001

Tabel T-C 30  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI RIAU**

No	Indikator	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					2018 (n-2)	2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	2022 (n+2)	2018 (n-2)	2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	
	KESEHATAN													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik			100	100	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024			BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Non SPM		4700 surat	4700 surat	0	0	0	4700 surat	4700 surat	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Non SPM		6 unit	6 unit	0	0	0	6 unit	6 unit	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeligara	Non SPM		9 Unit	9 Unit	0	0	0	9 Unit	9 Unit	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Non SPM		5500 porsi	5500 porsi	0	0	0	5500 porsi	5500 porsi	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Non SPM		145 kl	145 kl	0	0	0	145 kl	145 kl	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0	12 bln	12 bln	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi	Persentase arsip dinas kesehatan provinsi Riau dikelola sesuai standar	Non SPM		100%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase dokumen bantuan keuangan, bantuan hibah dan bantuan sosial yang terverifikasi	Non SPM		100%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyediaan pengelolaan arsip dinamis	Rentang waktu penyediaan pengolahan arsip dinamis sesuai standar kearsipan	Non SPM		12 bulan	12 bulan	0	0	0	12 bulan	12 bulan	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
1	NEW PLANNING													Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu			100	100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Non SPM		0	0	1500	1500	1700			1500	1500	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah rekening yang dibayar	Non SPM		0	0	12	12	12			12	12	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Non SPM		0	0	6	6	6			6	6	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Non SPM		0	0	12	12	12			12	12	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru

	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	Non SPM		0	0	200	200	200			200	200	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	Non SPM		0	0	13	13	13			13	13	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Non SPM		0	0	50	50	50			50	50	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Non SPM		0	0	25	25	25			25	25	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Non SPM		0	0	10	10	10			10	10	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Non SPM		0	0	5500	5500	5500			5500	5500	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Non SPM		0	0	12	12	12			12	12	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Non SPM		0	0	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Non SPM		0	0	14	14	14			14	14	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur yang sesuai standar kerja</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024</b>					<b>BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024</b>		<b>Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Non SPM		384 unit	384 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Non SPM		1 unit	1 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Non SPM		1 unit	1 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Non SPM		1 unit	1 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Non SPM		384 unit	384 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset	Jumlah genset yang dipelihara	Non SPM		1 unit	1 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembangunan gedung kantor. Pembangunan gedung Pengembangan sumber daya kesehatan kantor balai	Jumlah gedung kantor yang representatif yang tersedia untuk pelayanan kesehatan	Non SPM		1 gedung	1 gedung	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembangunan Pembangunan Gedung C Kantor Dinkes Provinsi Riau	Jumlah gedung C kantor dinas kesehatan provinsi Riau yang dibangun	Non SPM		1 unit	1 unit	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
2	<b>NEW PLANNING</b>													<b>Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Non SPM			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Non SPM			271	271	271	271			271	271	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Non SPM			100	107	107	110			107	107	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Non SPM			1	1	1	1			1	1	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru



	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah rumahdinas yang dipelihara	Non SPM		1	1	1	1			1	1	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Non SPM		30	30	30	30			30	30	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara	Non SPM		2	2	2	2			2	2	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	Non SPM		17	17	17	17			17	17	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Non SPM		5	5	5	5			5	5	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Non SPM		100	107	107	110			107	107	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen (Pendidikan Formal dan Informal)	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis dan manajemen	Non SPM		20	25	30	33			25	30	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	Non SPM		0	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	Non SPM		0	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Non SPM		0	0	1	0			0	1	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Non SPM		0	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas / operasional yang diadakan	Non SPM		0	1	1	1			1	1	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Non SPM		0	1	1	1			1	1	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sumber daya ASN			100%	100%	KEGIATAN DAN INDIKATOR INI DIGANTI MULAI DARI TAHUN 2020-2024				KEGIATAN DAN INDIKATOR INI DIGANTI MULAI DARI TAHUN 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Non SPM		35 org	35 org	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
3	NEW PLANNING												Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tahun 2020-2025
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Aparatur yang disiplin	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Non SPM		350	350	350	350			350	350	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Non SPM		134	134	134	134			134	134	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Non SPM		400	400	400	400			400	400	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Non SPM		350	350	350	350			350	350	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase keepatan penyampaian laporan			100%	100%	KEGIATAN DAN INDIKATOR INI DIGANTI MULAI DARI TAHUN 2020-2024				KEGIATAN DAN INDIKATOR INI DIGANTI MULAI DARI TAHUN 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Non SPM		1 dok	1 dok	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah (LAKIP)	Jumlah laporan penilaian kinerja anggaran Dinas Kesehatan provinsi Riau	Non SPM		2 dok	2 dok	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Non SPM		1 dok	1 dok	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah laporan Renja Dinas Kesehatan provinsi Riau	Non SPM		2 dok	2 dok	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengamanan aset dan barang milik daerah di kab/kota	Jumlah laporan aset dan barang milik daerah di kab/kota yang diamankan	Non SPM		0	1 dok	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	(1) Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk (2) Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar (3) Jumlah Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan			(1) 0,90 per 1.000 pddk (2) 40% (3) 75 %	(1) 0,90 per 1.000 pddk (2) 40% (3) 75 %	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan	Persentase RSUD Kab/Kota Milik Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Non SPM		40%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Tingkat Provinsi	Persentase PKM yang melaksanakanPerkesmas sesuai standar	Non SPM		40%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)	Persentase PKM yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	Non SPM		38%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Tingkat Provinsi	Pemantapan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan tingkat Primer	Non SPM		2 Inovasi	2 Inovasi	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED	Persentase PKM yang mampu PONED	Non SPM		38%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan Medis tk Prmy	Persentase PKM yang memiliki tenaga kesehatan yang mampu melakukan penanganan kegawatdaruratan medis tk Prmy	Non SPM		35%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi	Persentase PKM yang meningkat status akreditasi	Non SPM		0	30,12%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi	Persentase PKM yang telah melaksanakan manajemen PKM sesuai standar	Non SPM		38%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Standarisasi pemeriksaan penunjang di Yankes Primer	Persentase RSUD kab/kota yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	Non SPM		38%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan pelayanan laboratorium do fasyankes Tk Pertama	Persentase laboratorium kesehatan dasar sesuai standar	Non SPM		38%	40%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemantapan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi Puskesmas FKTP Tingkat Provinsi	Persentase kecamatan minimal 1 PKM yang terakreditasi (166 kec)	Non SPM		60,24	100,00%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan Pelayanan SPGDT melalui publik safety center (PSC)119 di Prov. Riau	Persentase pertolongan yang diberikan dengan respon tome cepat untuk kasus kecelakaan lalu lintas	Non SPM		100%	100%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau	(1) Persentase RS Pemerintah yang memiliki sertifikat akreditasi versi terbaru (17 RSUD Pemerintah, 5 /TNI/Polri/Dikti (2) Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah/Swasta se-Prop. Riau yang memiliki perizinan izin operasional	Non SPM				0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Bantuan operasional kesehatan Provinsi (BOK)- (DAK)	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Capaian SPM dan Program Keluarga Sehat	Non SPM		100%	100%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	(1) Persentase RS. Pemerintah yang terakreditasi versi 2012 (17 RSUD Pemerintah, 5 RS. TNI/Polri/Dikti (2) Persentase Kec. Yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (166 Kec) (3) Persentase Capaian standar Akreditasi Rumah Sakit			1] 75% 2] 40%	1] 80% 2] 60%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau	Jumlah RS pemerintah / swasta yang terakreditasi serta terawasi perizinan sarana kesehatannya			13 RS	14 RS	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
7	Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	(1) Persentase Krisis Kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 jam (2) Persenmtase Tingkat Kebugaran Masyarakat			100% dan 65 %	100% dan 68 %	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Persentase penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim yang direspon dalam waktu < 24 jam	SPM		75%	80%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan peralatan penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah paket peralatan penanggulangan krisis kesehatan yang diadakan	SPM		-	-	0	0	0		0	0	

	Peningkatan mutu pelayanan penanganan krisis kesehatan	Rentang waktu tersedianya dana penanganan krisis kesehatan	SPM		12 bln	12 bln	0	0	0			0	0	
8	Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan	Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi			76%	78%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024					BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	Non SPM		2 Dok	2 Dok	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengembangan Bank Data dan Informasi	Persentase bidang/UPT dan seksi yang tersedia data kesehatan terintegrasi	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan data cepat PKM di Provinsi Riau	Persentase FKTP milik pemerintah yang tersedia data cepat secara online	Non SPM		60%	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil) di Provinsi Riau dan kab/kota	Non SPM		13 dokumen	13 dokumen	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-Propinsi riau	Persentase Kepala Dinas dan Direktur RS di Provinsi Riau yang mengikuti forum kepala dinas se-propinsi Riau (2017-2019)	Non SPM		95%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Sistem Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen SKP Riau	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen SOP dinas kesehatan Provinsi Riau	Non SPM		1 dok	1 dok	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan SDM Perencanaan Kesehatan	Persentase perencana yang mengikuti pertemuan	Non SPM		85%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Dokumen kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Provinsi Riau	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah)	Jumlah dokumen kesepakatan kebijakan pembangunan kesehatan daerah	Non SPM		1 Dok	1 Dok	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang terevaluasi kegiatan bersumber APBN/APBD prov Riau	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang menggunakan SIKDA Genetik (2018-2019) dan Maintenance infrastruktur SIK	Non SPM		65%	65%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Jumlah paket Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 2. Persentase Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang diawak	Non SPM		1 Paket dan 100 %	1 Paket dan 100 %	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
9	Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan	Persentase Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinis dan Lingkungan Yang diayani telah terakreditasi			Klinis = 70% Lingk = 100%	Klinis = 70% Lingk = 100%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024					BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling	Jumlah Bulan Pemeriksaan Yang Dilaksanakan Di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (2018-2019)	Non SPM		90%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling	Jumlah paket bahan lab Klinis dan lingkungan yang diadakan	Non SPM		1 pkt	1 pkt	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bagi UPT Labkesling	Jumlah peralatan lab yang diadakan	Non SPM		5 pkt	1 pkt	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling	Rentang waktu pemeriksaan di UPT Laboratorium Kesehatan	Non SPM		12 bln	12 bln	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan bahan kimia (reagensia) layanan lingkungan UPT Labkesling	Persentase bahan laboratorium yang diadakan	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan alat-alat kesehatan layanan lingkungan UPT labkesling	Persentase peralatan laboratorium yang diadakan	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan mutu dan kapasitas tenaga laboratorium layanan lingkungan Kesehatan	Jumlah personil yang dilatih dalam rangka pelayanan UPT Labkesling	Non SPM		14 org	20 org	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

4	NEW PLANNING																	Pada Tahun 2019-2025 program ini (Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ) berganti nama menjadi Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	(1) Persentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar	Non SPM			25%	35%	45%	55%				35%	45%				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
		(2) Persentase FKTP sesuai standar	Non SPM			100%	100%	100%	100%				100%	100%				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Non SPM			100%	100%	100%	100%				100%	100%				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
		Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	Non SPM			100%	100%	100%	100%				100%	100%				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
		Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium				55%	60%	65%	70%				60%	65%				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Non SPM			40	45	50	55				45	50				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	Non SPM			40	43	45	48				43	45				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	Non SPM			32	41.6	50	50				41.6	50				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	Non SPM			100	100	100	100				100	100				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	Non SPM			80	85	88	90				85	88				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	Non SPM			-	35	45	55				35	45				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	Non SPM			100	100	100	100				100	100				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	Non SPM			10	20	25	30				20	25				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	Non SPM			40	45	50	55				45	50				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) di Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	Non SPM			40	45	50	55				45	50				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi	Non SPM			-	3	5	8				3	5				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	Non SPM			-	85	100	100				85	100				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	Non SPM			100	100	100	100				100	100				Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru

	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	Non SPM		20	25	35	40			25	35	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau		Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	Non SPM		20	50	65	75			50	65	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Memenuhkan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase Memenuhkan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi	Non SPM		-	50	100	-			50	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( RAKERKESDA)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	Non SPM		2	2	2	2			2	2	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau.	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	Non SPM		13	13	13	13			13	13	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	Non SPM		80	80	80	80			80	80	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	Non SPM		85	85	85	85			85	85	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pelayanan Laboratorium klinis dan lingkungan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium lingkungan sesuai standard	Non SPM		65	70	75	80			70	75	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standard	Non SPM		40	45	50	55			45	50	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Memenuhkan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Memenuhkan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Memenuhkan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Memenuhkan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan lingkungan sesuai standar			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
10	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan kesehatan melalui JKN		75%	75%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024					BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan jaminan kesehatan	Non SPM	90%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

	Penyediaan Biaya Jamkesda	Persentase penduduk, iskin dan tidak mampu diluar kuota penerima bantuan uran jaminan kesehatan (PBI-IJK) yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan mendaftar/dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan	Non SPM	90%	90%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah kab/kota melaksanakan manajemen pembiayaan kesehatan dengan baik dan benar	Non SPM	90%	90%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	Non SPM	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki IKNKIS	Persentase Masyarakat Miskin tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang terdaftar ke dalam IKNKIS	Non SPM	90%	90%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
5	<b>NEW PLANNING</b>											<b>Pada Tahun 2019-2025 MENJADI PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	
	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	Non SPM			<b>831.350</b>	<b>860.161</b>	<b>892.754</b>	<b>935.475</b>		<b>860.161</b>	<b>892.754</b>	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru
	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	Non SPM	82	85	88	90			85	88	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru	
	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	Non SPM	100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru	
	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	Non SPM	1	1	1	1			1	1	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru	
	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah ke dalam JKN	Non SPM	85	87	90	93			87	90	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru	
	Pelaksanaan Pertimbangan Klinis di Provinsi Riau	Persentase permasalahan klinis yang tertangani di Kab/Kota se Provinsi Riau	Non SPM	-	50	66	75			50	66	Tahun 2020-2025 Dengan Nomenklatur Baru	
11	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>(1) Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (Prilaku Hidup bersih dan Sehat) (2) Persentase RS yang menerapkan PKRS (Promosi Kesehatan di RS) 3) Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat</b>		<b>65% 50% 80%</b>	<b>65% 50% 80%</b>								<b>Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini</b>
	Peningkatan kinerja Promkes dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang meningkatkan kinerja promkes dalam pemberdayaan masyarakat	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyebarluasan informasi	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan	Jumlah dokumen penguatan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Non SPM	3 dok	3 dok	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
12	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Prevalensi Gizi Buruk Balita</b>		<b>1,2 Persen</b>	<b>1,2 Persen</b>	<b>BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024</b>				<b>BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024</b>		<b>Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini</b>	
	Penanggulangan masalah gizi	Jumlah kab/kota yang mengupayakan penanggulangan masalah gizi	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang terpantau status gizi masyarakat	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah pengelola gizi yang meningkat kinerja SDM pengelola program	Non SPM	Jumlah	Jumlah	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	Non SPM	85%	85%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	

	Buffer Stock Bahan Penanggulangan Masalah Gizi	Jumlah buffer stock bahan penanggulangan masalah gizi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan	Non SPM		12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan			40%	40%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024					BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas	Persentase penduduk yang menggunakan sarana air minum yang layak	Non SPM		50%	50%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan 5 pilar desa STBM	Non SPM		773 desa/kel	773 desa/kel	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU)	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Non SPM		58%	58%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan pengembangan wilayah pemukiman sehat	Jumlah kab/kota menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Non SPM		12 kab/Kota	12 kab/Kota	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase PKM /RS yang ramah lingkungan (mempunyai dokumen SPPL,UPL/U dan IPAL)	Non SPM		26%	26%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase tempat penelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Non SPM		30%	30%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Advokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah kab/kota yang teradvokasi keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah kerja	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
14	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 diukur dengan proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%) 2. Angka Kematian bayi dan anak (per 1.000) diukur dengan proksi : Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)			Fasyankes : 77% K4 : 78 % KN 1 : 91%	Fasyankes : 77% K4 : 78 % KN 1 : 91%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024					BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Meningkatnya hasil kualitas pengelola Program kesehatan anak (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan PKPR, UKS dan Remaja di Kabupaten/Kota dan Puskesmas	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak	Persentase program kesehatan anak sesuai standar SPM bidang kesehatan	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita)	Jumlah kematian bayi dan balita	Non SPM		bayi (< 1000) kasus dan balita (< 1000 kasus)	bayi (< 1000) kasus dan balita (< 1000 kasus)	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Kewaspadaan Balita Beresiko	Persentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu	Persentase capaian program kesehatan ibu sesuai standar SPM bidang kesehatan	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu	Persentase peningkatan kinerja SDM kesehatan ibu	Non SPM		100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan Ibu	Persentase jumlah ibu hamil yang terdeteksi sebagai kelompok yang berisiko	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu	Jumlah kematian ibu	Non SPM		< 120 kasus	< 120 kasus	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase jumlah pkm yang mampu menangani KTA	Non SPM		-	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
6	NEW PLANNING													Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu diukur dengan Proxy : 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	Non SPM			80	80	85	90			80	85	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	2. Kunjungan Antenatal (K4) (%)	Non SPM			92	92	94	96			92	94	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	3. Angka Kematian Bayi diukur dengan Proxy : Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap )	Non SPM			92	92	94	96			92	94	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Non SPM			26	25	24	22			25	24	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	Non SPM			36	41	46	51			41	46	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Non SPM			60	65	70	75			65	70	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Non SPM			80	90	100	100			90	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Penyusunan Kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan	Non SPM			3	3	3	3			3	3	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Persentase Capaian UKBM Aktif	Non SPM			48,17	52,00	56,17	59,50			52,00	56,17	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Advokasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan	- Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa minimal 10%	Non SPM			7,97	15	20	25			15	20	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	Non SPM			12	12	12	12			12	12	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	Non SPM			15	16	19	22			16	19	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Peningkatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	Non SPM			3	12	15	18			12	15	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan CSR Bidang Kesehatan	Jumlah perusahaan yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan	Non SPM			10	12	15	18			12	15	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan Organisasi Kesehatan Bidang Kesehatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber daya untuk mendukung kesehatan	Non SPM			6	8	12	15			8	12	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	Non SPM			9	10	11	12			10	11	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas yang Memenuhi Standar	Kab/Kota yang mencapai target KF3	Non SPM			7	8	9	10			8	9	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu	Non SPM			15	20	25	30			20	25	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kasus Kematian Ibu hamil,bersalin dan nifas yang sudah Tervalidasi	Non SPM			60	70	70	70			70	70	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	SPM			90	150	170	190			150	170	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	SPM			140	160	180	200			160	180	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	Non SPM			30	60	90	120			60	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini



	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan kegiatan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	Non SPM		12	24	36	48		24	36	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	Non SPM		60	60	60	60		60	60	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi pada balita dan masyarakat	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	Non SPM		92,87	93,27	93,59	93,91		93,27	93,59	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Non SPM		61,37	63,77	66,2	68,67		63,77	66,2	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	Non SPM		36	36	36	36		36	36	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Surveilans Gizi	BB/UI(gizi buruk dan kurang )	Non SPM		8,95	8,9	8,85	8,8		8,9	8,85	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Kecukupan Gizi Masyarakat	Persentase Kecukupan Gizi Masyarakat	Non SPM		77,08	77,95	78,71	79,59		77,95	78,71	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	Non SPM		50	55	60	65		55	60	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	Non SPM		994	1170	1345	1520		1170	1345	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	Non SPM		58	60	62	64%		60	62	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	Non SPM		4	5	6	8		5	6	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Non SPM		32	22	24	26		22	24	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	(1) Persentase ODHA yang pernah mengakses Layanan AVR (2) Angka Kesakitan Penyakit Menular Malaria (3) Case Notification Rate (CNR) semua kasus TB. Per 100.000 penduduk (4) Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD) (5) Persentase Bayi usia < 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar (6)Persentase UCI (Universal Child Immunization)			1. ODHA 90% 2. Malaria <1/1000 pddk 3. CNR 112 per 100.000 pddk 4. DBD <46 /100.000 pddk 5. 93% 6. UCI 92%	1. ODHA 90% 2. Malaria <1/1000 pddk 3. CNR 112 per 100.000 pddk 4. DBD <46 /100.000 pddk 5. 93% 6. UCI 92%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024			BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024			Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS	Prevalensi HIV/AIDS	Non SPM		< 0,5 %	< 0,5 %	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Peningkatan pelayanan HIV dan AIDS (layanan Komprehensif berkesinambungan) IKB	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Non SPM		100%	100%	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria	Persentase kab/kota mencapai eliminasi malaria	Non SPM		40%	40%	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Peningkatan kapasitas dan cakupan dalam pengendalian TB	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) minimal 85%	Non SPM		76%	76%	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML	Jumlah paket logistik untuk menunjang pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan diare	Non SPM		1 paket	1 paket	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Peningkatan Program Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah jemaah haji 3 bulan sebelum operasional di kab/kota	Non SPM		95%	95%	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pengendalian penyakit menular DBD	Angka kesakitan penyakit menular DBD	Non SPM		46 per 100.000 pddk	46 per 100.000 pddk	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	

	Pengendalian Penyakit ISPA	Persentase kab/kota yang meningkat program ISPA	Non SPM	50%	50%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian Penyakit Diare	Persentase kab/kota yang meningkat program diare	Non SPM	50%	50%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian Hepatitis Virus	Jumlah kab/kota yang terisolasi Hepatitis Virus	Non SPM	12 Kab / Kota	12 Kab / Kota	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Persentase kab/kota yang melakukan pemetaan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Non SPM	80%	80%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	(1) Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun perlahun di satu wilayah kerja tertentu. (2) Discharger/Eliminasi Campak	Non SPM	1] ≥ 2/100000 pddk dibawah 15 tahun [2] 2/100 ribu pddk	1] ≥ 2/100000 pddk dibawah 15 tahun [2] 2/100 ribu pddk	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan Kesehatan Matra	Persentase situasi matra di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	Non SPM	95%	95%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	Non SPM	94%	94%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan sarana pendukung imunisasi	Jumlah paket sarana pendukung imunisasi yang diadakan	Non SPM	3 paket	3 paket	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus Dalam Rangka Akselerasi GAIN UCI	persentase desa yang mencapai target UCI di daerah fokus (4 kabupaten)	Non SPM	88%	88%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase alert yang direspon oleh kabupaten/kota	Non SPM	85%	85%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan pelayanan pengendalian TB Resisten Obat	Angka TB MDR	Non SPM	≤ 4% dari kasus TB Paru	≤ 4% dari kasus TB Paru	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persiapan Embarkasi dan DebarKasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarKasi Haji	Non SPM	95%	95%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Intensifikasi penemuan kasus TB	Jumlah kab/kota dengan tenaga terlatih dan terampil dalam penemuan secara dini pasien TB	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian Kecacingan	Terlaksananya a Pengendalian Kecacingan di Kab/Kota non endemis filariasis dan di kab/kota pasca POPM Filariasis	Non SPM	4 kab/kota	4 kab/kota	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Kampanye Measles Rubella	Persentase pelaksanaan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi Kampanye Measles Rubella (MR)	Non SPM	-	-	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan kapasitas dan tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis		Non SPM			0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian kusta dan frambusia	Prevalensi temuan kasus kusta dan frambusia	Non SPM	< 1%/ 100.000 pddk	< 1%/ 100.000 pddk	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
16	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Fasyankes yang melaksanakan deteksi dan tata laksana dini faktor resiko penyakit tidak menular		80%	80%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024					BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) sesuai standar (HT, DM, Keswa dan Rokok)	Non SPM	60%	60%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengembangan Posbindu PTM	Persentase kab/kota dengan Posbindu aktif	Non SPM	60%	60%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan bahan dan alkes deteksi dini penyakit tidak menular	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit TidakMenular (PTM)	Non SPM	-	-	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan surveilans penyakit tidak menular	Persentase kab/kota yang meningkatnya surveilans PTM	Non SPM	60%	60%	0	0	0	0	0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
7	NEW PLANNING											Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase ODHA yang diobati	Non SPM		17%	23%	28%	33%			23%	28%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Success Rate TB Paru	Non SPM		67%	67%	80%	90%			67%	80%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk	Non SPM		< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk			< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	Non SPM		92%	93%	93%	94%			93%	93%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	Non SPM		65	65%	75%	85%			65%	75%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Non SPM		50%	60%	70%	80%			60%	70%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Non SPM		50%	60%	70%	80%			60%	70%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	Non SPM		81	81	81	81			81	81	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Persentase bumul yang diperiksa syphilis dan diobati	Non SPM		80	80	90	100			80	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	Non SPM		67	80	90	95			80	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Succes Rate TB	Non SPM		90	90	90	90			90	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Penemuan kebutuhan obat dan logistik P3M	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	Non SPM		70	70	72	74			70	72	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pengadaan Logistik P3M	Persentase kebutuhan Logistik Program P3M yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	Non SPM		70	70	72	74			70	72	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Jumlah kasus malaria positif (konfirmasi Laboratorium) di kabupaten/kota selama satu tahun per 1000 penduduk	Non SPM		< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk			< 1 / 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	Non SPM		85	85	90	92			85	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	Non SPM		85	85	90	92			85	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD31)	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja	Non SPM		(1) ≥ 2/100.000 penduduk dibawah 15 tahun	50	60	70			50	60	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Persentase desa/keurahan UCI	Non SPM		90	88	90	92			88	90	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi	Jumlah paket sarana pendukung imunisasi yang diadakan	Non SPM		3	3	3	3			3	3	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini



17	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasyankes Dasar Pemerintah			80 Persen	80 Persen	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional TK Provinsi Riau Th 2019	Jumlah Kab/Kota yang Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional sesuai target	Non SPM		12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA	jumlah RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan penyalahgunaan NAPZA	Non SPM		62 RS dan IPWL	62 RS dan IPWL	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional	Jumlah sarana distribusi obat, alkes, kosmetik, makanan minuman dan obat tradisional yang sesuai standar	Non SPM		270 sarana	270 sarana	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional	2. Presentase Penggunaan Obat Rasional Di Fasyankes Dasar Pemerintah	Non SPM		80%	85%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di Provinsi Riau	Persentase PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang melakukan cara produksi pangan rumah tangga yang baik	Non SPM		70%	75%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
18	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan logistik kesehatan			98%	98%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini	
	Pengadaan obat bufer stok provinsi	Persentase obat bufer stok yang tersedia di Provinsi Riau	Non SPM		89%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan obat program	Persentase ketersediaan obat program	Non SPM		89%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Provinsi	Persentase kebutuhan obat, vaksin, BMHP dan Alkes di Provinsi Riau	Non SPM		89%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes dinas kesehatan kab/kota se Provinsi Riau	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes dinas kesehatan kab/kota se Provinsi Riau	Non SPM		75%	78%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan mutu pelayanan UPT farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Persentase kepuasan terhadap mutu pelayanan UPT farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Non SPM		85%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik	Jumlah kab/kota yang mampu menyusun RKL buffer stock sesuai standar	Non SPM		12 kab/kota	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock	Persentase ketersediaan BMHP dan Alkes Buffer Stock di Provinsi Riau	Non SPM		75%	78%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan penunjang logistik program	Persentase tersedianya penunjang logistik program	Non SPM		92%	93%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penilaian instalasi farmasi dan tenaga kefarmasian berprestasi di Prov. Riau	Jumlah instalasi farmasi dan tenaga kefarmasian berprestasi di Prov. Riau yang berprestasi di provinsi riau	Non SPM		3 instalasi dan 3 petugas	3 instalasi dan 3 petugas	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan instalasi farmasi kab/kota dalam rangka penyimpanan obat dan vaksin	Persentase instalasi farmasi kab/kota yang dilakukan monitoring dan pembinaan	Non SPM		89%	90%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Sistem pencatatan dan pelaporan sistem informasi farmasi dan logistik (SIFIT)	Persentase data ketersediaan obat di provinsi riau	Non SPM		65%	70%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

	Pengadaan obat dan vaksin di Prov. Riau	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas saat dibutuhkan obat dan vaksin di puskesmas saat dibutuhkan	Non SPM		100%	100%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan alkes dinas kesehatan kab./kota se Propinsi Riau	Non SPM		77%	77%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengendalian teknis pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase instalasi farmasi di Prov. Riau yang melakukan manajemen dan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Non SPM		90%	90%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan sistem informasi manajemen obat dan perbekalan kesehatan di Prov. Riau	Persentase implementasi e-logistik	Non SPM		100%	100%	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
8	<b>NEW PLANNING</b>												Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES
	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>	<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	Non SPM		47%	51%	56%	61%			51%	56%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
		<b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>	Non SPM		50%	55%	58%	60%			55%	58%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
		<b>Persentase ketersediaan obat, vaksin dan logistik</b>	Non SPM		97%	98%	99%	100%			98%	99%	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	Non SPM		65	70	75	80			70	75	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	Non SPM		65	70	75	80			70	75	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Non SPM		80	83	85	87			83	85	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) yang dibina sesuai standar	Non SPM		50	55	60	63			55	60	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM, sarana, prasarana dan operasional pelayanan di UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Non SPM		100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	Non SPM		97	87	89	90			87	89	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Persentase ketersediaan BMHP, alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Non SPM		82	84	86	88			84	86	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	Non SPM		82	84	86	88			84	86	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	Non SPM		1	1	1	1			1	1	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	Non SPM		90	95	100	100			95	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	Non SPM		75	80	85	90			80	85	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
19	Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	(1) Persentase Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan analisis kesehatan) (2) Persentase RSUD Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang			90 % 90%	95 % 95%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau	Jumlah paramedis PTT yang diterima	Non SPM	200 orang	200 orang	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau	Persentase pemohon STR yang diusulkan ke MKTP	Non SPM	100 %	100 %	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan data tenaga kesehatan kab/kota Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di kab/kota Prov. Riau	Non SPM	12 dok	12 dok	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kab/kota yang ditingkatnya kompetensi SDM kesehatannya	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemerataan tenaga kesehatan kab/kota se Provinsi Riau	Tersedianya data tenaga kesehatan pada sarana kesehatan di kab/kota se Provinsi Riau	Non SPM	1 dok	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SDM kesehatan yang ditingkatkan mutunya	Non SPM	12 kab/kota	12 kab/kota	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program intersep tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan intersep sesuai dengan buku panduan	Non SPM	100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah laporan data-data ASN berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dll	Non SPM			0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
20	Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan	(1) Persentase Tenaga kesehatan yang dilatih dengan kompetensi baik  (3) Persentase Penelitian kesehatan yang dimanfaatkan			1] 95% 2] 100%	1] 95% 2] 100%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat	Jumlah SDM yang mengikuti diklat mutu dan kapasitas	Non SPM	20 org	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Evaluasi Pasca Pelatihan	Persentase peserta yang menerapkan hasil pelatihan sesuai standar	Non SPM	80%	85%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah jenis Diklat yang dibutuhkan	Non SPM	2 Jenis	2 Jenis	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Penelitian bidang kesehatan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Non SPM	1 penelitian	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan	Non SPM	330 org	400 org	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Mutu dan Kapasitas	Non SPM	100%	100%	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Peningkatan sumber daya manusia kesehatan olah raga masyarakat	Jumlah orang yang dilakukan test kebugaran	Non SPM	1200 org	-	0	0	0			0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

NEW PLANNING													Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan	Non SPM			70	72	74	6			72	74	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	Non SPM			35	37	39	41			37	39	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar	Non SPM			80	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	Non SPM			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	Non SPM			12	12	12	12			12	12	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	Non SPM			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	Non SPM			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs)	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	Non SPM			95	144	150	155			12	12	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	Non SPM			191	191	191	191			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Penyelenggaraan Pelaksanaan UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan UPT Bapelkes	Non SPM			100	100	100	100			100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	Non SPM			-	61	61	61			61	61	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	Non SPM			30	32	34	35			32	34	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Penyediaan Bahan dan Alat Alat Praktek Labor Kelas UPT. Bapelkes	% Pemenuhan Bahan dan Alat Praktek Labor Kelas UPT. Bapelkes Sesuai Standar	Non SPM			-	30	30	30			30	30	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Rehab Gedung UPT. Bapelkes	Jumlah ruang UPT Bapelkes yang direhab sesuai dengan fungsinya	Non SPM			-	5	7	2			5	7	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	Non SPM			50	60	60	65			60	60	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Penyusunan Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan	Non SPM			2	2	2	2			2	2	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Pendampingan Akreditasi Bapelkes	Jumlah pendampingan akreditasi yang dilaksanakan	Non SPM			-	5	5	6			5	5	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	Non SPM			270	540	540	540			540	540	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini



	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	Non SPM		-	2	2	2			2	2	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pembinaan Lokus Praktek Lapangan	Jumlah Lokus Praktek lapangan pelatihan yang sesuai standar	Non SPM		2	2	2	2			2	2	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
21	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung Akreditasi Rumah Sakit			88%	88%	BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024				BERGANTI NOMENKLATUR 2020-2024		Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan Data Sarana Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen data sarana dan prasana di FKTP dan RS milik Pemerintah yang Memenuhi Standar	Non SPM		1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		0	0	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
10	NEW PLANNING												Pada Tahun 2019-2025 program ini MENJADI PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	Non SPM			62	65	67	70		65	67	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengelolaan data sarana dan prasarana kesehatan di provinsi riau	persentase ketersediaan data sarana dan prasarana FKTP dan RS milik pemerintah yang sesuai standar	Non SPM			82	75	80	90		75	80	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	Non SPM			100	100	100	100		100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini
	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	Non SPM			100	100	100	100		100	100	Tahun 2020-2025 Tidak Menggunakan Nomenklatur ini

Indikator	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Catatan Analisa	
				2018 (n-2)	2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	2022 (n+2)	2018 (n-2)	2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)		
<b>KESEHATAN</b>														
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik</b>			<b>100</b>	<b>100</b>									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim Dinas Kesehatan Provinsi Riau			4700 surat	4700 surat									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik			12 bln	12 bln									
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			6 unit	6 unit									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipeligara			9 Unit	9 Unit									
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			12 bln	12 bln									
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor			12 bln	12 bln									
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bln	12 bln									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bln	12 bln									
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bln	12 bln									
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan			5500 porsi	5500 porsi									
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			145 kl	145 kl									
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa keamanan kantor			12 bln	12 bln									
Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi	Persentase arsip dinas kesehatan provinsi Riau dikelola sesuai standar			100%	100%									
Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Persentase dokumen bantuan keuangan, bantuan hibah dan bantuan sosial yang terverifikasi			100%	100%									
Penyediaan pengelolaan arsip dinamis	Rentang waktu penyediaan pengolahan arsip dinamis sesuai standar kearsipan			12 bulan	12 bulan									
<b>NEW PLANNING</b>														
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim				1500	1500	1500							
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah rekening yang dibayar				12	12	12							
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				6	6	6							
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12	12	12							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan				200	200	200							

Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara				13	13	13						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan				50	50	50						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan				25	25	25						
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				10	10	10						
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				5500	5500	5500						
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah				12	12	12						
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan				100	100	100						
Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi	Jumlah tenaga satpam yang disediakan				14	14	14						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik													
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur yang sesuai standar kerja</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>							
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan				384 unit%	384 unit%							
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan				1 unit	1 unit							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	1 unit							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				1 unit	1 unit							
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara				384 unit	384 unit							
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset	Jumlah genset yang dipelihara				1 unit	1 unit							
Pembangunan gedung kantor. Pembangunan gedung Pengembangan sumber daya kesehatan kantor balai pelatihan kesehatan Prov. Riau	Jumlah gedung kantor yang representatif yang tersedia untuk pelayanan kesehatan				1 gedung	1 gedung							
Pembangunan Pembangunan Gedung C Kantor Dinkes Provinsi Riau	Jumlah gedung C kantor dinas kesehatan provinsi Riau yang dibangun				1 unit	1 unit							
<b>NEW PLANNING</b>													
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan						271	271	271				
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan						107	107	110				
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara						1	1	1				
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara						1	1	1				

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara				30	30	30					
Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara				2	2	2					
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara				17	17	17					
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara				5	5	5					
Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				107	107	110					
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen (Pendidikan Formal dan Informal)	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat teknis dan manajemen				25	30	33					
Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun				0	0	0					
Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun				0	0	0					
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun				0	1	0					
Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan				0	0	0					
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas / operasional yang diadakan				1	1	1					
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan				1	1	1					
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas sumber daya ASN</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>						
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				35 org	35 org						
<b>NEW PLANNING</b>												
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Aparatur yang disiplin</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				350	350	350					
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan				134	134	134					
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan				400	400	400					
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan				350	350	350					
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase ketepatan penyampaian laporan</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>KEGIATAN DAN INDIKATOR INI TIDAK ADA DIMULAI DARI TAHUN 2020-2024</b>				<b>KEGIATAN DAN INDIKATOR INI TIDAK ADA DIMULAI DARI TAHUN 2020-2024</b>	
Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah				1 dok	1 dok						

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instalasi pemerintah (LAKIP)	Jumlah laporan penilaian kinerja anggaran Dinas Kesehatan provinsi Riau			2 dok	2 dok								
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1 dok	1 dok								
Penyusunan Renja SKPD	Jumlah laporan Renja Dinas Kesehatan provinsi Riau			2 dok	2 dok								
Pengamanan aset dan barang milik daerah di kab/kota	Jumlah laporan aset dan barang milik daerah di kab/kota yang diamankan			1 dok	1 dok								
Pengamanan aset dan barang milik daerah di kab/kota	Jumlah aset dan barang milik daerah di kab/kota			12 Kab/kota	12 Kab/kota								
<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasyankes Dasar Pemerintah</b>			<b>80 Persen</b>	<b>80 Persen</b>								
Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional TK Provinsi Riau Th 2019	Jumlah Kab/Kota yang Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional sesuai target			12 kab/kota	12 kab/kota								
Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan penyalahgunaan aan NAPZA			60 RS dan IPWL	60 RS dan IPWL								
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional	Jumlah sarana distribusi obat, alkes, kosmetik, makanan minuman dan obat tradisional yang sesuai standar			270 sarana	270 sarana								
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional	2. Presentase Penggunaan Obat Rasional Di Fasyankes Dasar Pemerintah			85%	85%								
Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di Provinsi Riau	Persentase PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang melakukan cara produksi pangan rumah tangga yang baik			75%	75%								
<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>(1) Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk (2) Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar (3) Jumlah Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan</b>			<b>(1) 0,90 per 1.000 pddk (2) 40% (3) 75 %</b>	<b>(1) 0,90 per 1.000 pddk (2) 40% (3) 75 %</b>								
Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan	Persentase RSUD Kab/Kota Milik Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar			40%	40%								
Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Tingkat Provinsi	Persentase PKM yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar			40%	40%								
Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)	Persentase PKM yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar			40%	40%								
<b>Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Tingkat Provinsi</b>	<b>Pemantapan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan tingkat Primer</b>			<b>2 Inovasi</b>	<b>2 Inovasi</b>								
Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED	Persentase PKM yang mampu PONED			40%	40%								
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan Medis tk.Prov	Persentase PKM yang memiliki tenaga kesehatan yang mampu melakukan penanggulangan penderita gawat darurat			40%	40%								
Pemantapan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi FKTP Tingkat Provinsi	Persentase PKM yang meningkat status akreditasi			30,12%	30,12%								
Peningkatan Pengelolaan Manajemen FKTP Tingkat Provinsi	Persentase PKM yang telah melaksanakan manajemen PKM sesuai standar			40%	40%								









Peningkatan kinerja Promkes dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang meningkatkan kinerja promkes dalam pemberdayaan masyarakat			12 kab/kota	12 kab/kota								
Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyebarluasan informasi			12 kab/kota	12 kab/kota								
Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan	Jumlah dokumen penguatan kebijakan publik berwawasan kesehatan			3 dok	3 dok								
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Prevalensi Gizi Buruk Balita</b>			<b>1,2 Persen</b>	<b>1,2 Persen</b>								
Penanggulangan masalah gizi	Jumlah kab/kota yang mengupayakan penanggulangan masalah gizi			12 kab/kota	12 kab/kota								
Pemantauan Status Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang terpantau status gizi masyarakat			12 kab/kota	12 kab/kota								
Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah pengelola gizi yang meningkat kinerja SDM pengelola program			Jumlah	Jumlah								
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Persentase kecamatan bebas rawan gizi			85%	85%								
Buffer Stock Bahan Penanggulangan Masalah Gizi	Jumlah buffer stock bahan penanggulangan masalah gizi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan			12 kab/kota	12 kab/kota								
<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan</b>			<b>40%</b>	<b>40%</b>								
Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas	Persentase penduduk yang menggunakan sarana air minum yang layak			50%	50%								
Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan 5 pilar desa STBM			773 desa/kel	773 desa/kel								
Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU)	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan			58%	58%								
Peningkatan pengembangan wilayah pemukiman sehat	Jumlah kab/kota menyelenggarakan tatanan kawasan sehat			12 kab/Kota	12 kab/Kota								
Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase PKM /RS yang ramah lingkungan (mempunyai dokumen SPPL,UPLUJ dan IPAL)			26%	26%								
Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase tempat penelolan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan			30%	30%								
Advokasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah kab/kota yang terakvokasi keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah kerja			-	-								
<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>(1) Persentase ODHA yang pernah mengakses Layanan AVR (2) Angka Kesakitan Penyakit Menular Malaria (3) Case Notification Rate (CNR) semua kasus TB. Per 100.000 penduduk (4) Angka Kesakitan Penyakit Demam Berdarah (DBD) (5) Persentase Bayi usia &lt; 1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar (6)Persentase UCI (Universal Child Immunization)</b>			<b>1. ODHA 90% 2. Malaria &lt;1/1000 pddk 3. CNR 112 per 100.000 pddk 4. DBD &lt;46 /100.000 pddk 5. 93% 6. UCI 92%</b>	<b>1. ODHA 90% 2. Malaria &lt;1/1000 pddk 3. CNR 112 per 100.000 pddk 4. DBD &lt;46 /100.000 pddk 5. 93% 6. UCI 92%</b>								
Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS	Prevalensi HIV/AIDS			< 0,5 %	< 0,5 %								

Peningkatan pelayanan HIV dan AIDS (layanan Komprehensif berkesinambungan) IKB	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke Fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar			100%	100%								
Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria	Persentase kab/kota mencapai eliminasi malaria			40%	40%								
Peningkatan kapasitas dan cakupan dalam pengendalian TB	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (SR) minimal 85%			76%	76%								
Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML	Jumlah paket logistik untuk menunjang pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan diare			1 paket	1 paket								
Peningkatan Program Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional di kab/kota			95%	95%								
Pengendalian penyakit menular DBD	Angka kesakitan penyakit menular DBD			46 per 100.000 pddk	46 per 100.000 pddk								
Pengendalian Penyakit ISPA	Persentase kab/kota yang meningkat program ISPA			50%	50%								
Pengendalian Penyakit Diare	Persentase kab/kota yang meningkat program diare			50%	50%								
Pengendalian Hepatitis Virus	Jumlah kab/kota yang terisolasi Hepatitis Virus			12 Kab / Kota	12 Kab / Kota								
Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit (STP)	Persentase kab/kota yang melakukan pemetaan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)			80%	80%								
Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	(1) Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu wilayah kerja tertentu. (2) Discharger/Eliminasi Campak			1] ≥ 2/100000 pddk dibawah 15 tahun [2] 2/100 ribu pddk	1] ≥ 2/100000 pddk dibawah 15 tahun [2] 2/100 ribu pddk								
Pengelolaan Kesehatan Matra	Persentase situasi matra di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan			95%	95%								
Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan			94%	94%								
Pengadaan sarana pendukung imunisasi	Jumlah paket sarana pendukung imunisasi yang diadakan			3 paket	3 paket								
Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus Dalam Rangka Akselerasi GAIN UCI	persentase desa yang mencapai target UCI di daerah fokus (4 kabupaten)			88%	88%								
Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase alert yang direpson oleh kabupaten/kota			85%	85%								
Peningkatan pelayanan pengendalian TB Resisten Obat	Angka TB MDR			≤ 4% dari kasus TB Paru	≤ 4% dari kasus TB Paru								
Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji			95%	95%								
Intensifikasi penemuan kasus TB	Jumlah kab/kota dengan tenaga terlatih dan terampil dalam penemuan secara dini pasien TB			12 kab/kota	12 kab/kota								
Pengendalian Kecacingan	Terlaksananya a Pengendalian Kecacingan di Kab/Kota non endemis filariasis dan di kab/kota pasca POPM Filariasis			4 kab/kota	4 kab/kota								
Kampanye Measles Rubella	Persentase pelaksanaan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi Kampanye Measles Rubela (MR)			-	-								
Peningkatan kapasitas dan tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis													
Pengendalian kusta dan frambusia	Prevalensi temuan kasus kusta dan frambusia			< 1%/ 100.000 pddk	< 1%/ 100.000 pddk								

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	(1) Persentase RS. Pemerintah yang terakreditasi versi 2012 (17 RSUD Pemerintah, 5 RS. TNI/Polri/Dikti) (2) Persentase Kec. Yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (166 Kec) (3) Persentase Capaian standar Akreditasi Rumah Sakit			1) 80% 2) 60%	1) 80% 2) 60%								
Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau	Jumlah RS pemerintah / swasta yang terakreditasi serta terawasi perizinan sarana kesehatannya			14 RS	14 RS								
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung Akreditasi Rumah Sakit			88%	88%								
Pengelolaan Data Sarana Kesehatan	Jumlah tersedianya dokumen data sarana dan prasana di FKTP dan RS milik Pemerintah yang Memenuhi Standar			1 dokumen	1 dokumen								
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 diukur dengan proksi : Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) dan Kunjungan Antenatal (K4) (%) 2. Angka Kematian bayi dan anak (per 1.000) diukur dengan proksi : Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)			Fasyankes : 77% K4 : 78 % KN 1 : 91%	Fasyankes : 77% K4 : 78 % KN 1 : 91%								
Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Meningkatnya hasil kualitas pengelola Program kesehatan anak (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan PKPR, UKS dan Remaja di Kabupaten/Kota dan Puskesmas			-	-								
Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak	Persentase program kesehatan anak sesuai standar SPM bidang kesehatan			100%	100%								
Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita)	Jumlah kematian bayi dan balita			bayi (< 1000 kasus dan balita (< 1000 kasus)	bayi (< 1000 kasus dan balita (< 1000 kasus)								
Kewaspadaan Balita Beresiko	Persentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	-								
Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu	Persentase capaian program kesehatan ibu sesuai standar SPM bidang kesehatan			-	-								
Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu	Persentase peningkatan kinerja SDM kesehatan ibu			100%	100%								
Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan Ibu	Persentase jumlah ibu hamil yang terdeteksi sebagai kelompok yang beresiko			-	-								
Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu	Jumlah kematian ibu			< 120 kasus	< 120 kasus								
Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase jumlah pkm yang mampu menangani KTA			-	-								
Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan logistik kesehatan			98%	98%								

Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik	Jumlah kab/kota yang mampu menyusun RKL buffer stock sesuai standar			-	-								
Pengadaan obat bufer stok provinsi	Persentase obat bufer stok yang tersedia di Provinsi Riau			90%	90%								
Pengadaan obat program	Persentase ketersediaan obat program			90%	90%								
Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes dinas kesehatan kab/kota se Provinsi Riau	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes dinas kesehatan kab/kota se Provinsi Riau			78%	78%								
Peningkatan mutu pelayanan UPT farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Persentase kepuasan terhadap mutu pelayanan UPT farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau			90%	90%								
Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock	Persentase ketersediaan BMHP dan Alkes Buffer Stock di Propinsi Riau			78%	78%								
Pengadaan logistik program	Persentase tersedianya penunjang logistik program			93%	93%								
Penilaian instalasi farmasi dan tenaga kefarmasian berprestasi di Prov. Riau	Jumlah instalasi farmasi dan tenaga kefarmasian berprestasi di Prov. Riau yang berprestasi di provinsi riau			3 instalasi dan 3 petugas	3 instalasi dan 3 petugas								
Pembinaan instalasi farmasi kab/kota dalam rangka penyimpanan obat dan vaksin	Persentase instalasi farmasi kab/kota yang dilakukan monitoring dan pembinaan			90%	90%								
Sistem pencatatan dan pelaporan sistem informasi farmasi dan logistik (SIFIT)	Persentase data ketersediaan obat di provinsi riau			70%	70%								
Pengadaan obat dan vaksin di Prov. Riau	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas saat dibutuhkan obat dan vaksin di puskesmas saat dibutuhkan			100%	100%								
Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Provinsi	Persentase kebutuhan obat, vaksin, BMHP dan Alkes di Provinsi Riau			90%	90%								
Peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	Persentase ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan alkes dinas kesehatan kab./kota se Propinsi Riau			77%	77%								
Pengendalian teknis pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase instalasi farmasi di Prov. Riau yang melakukan manajemen dan pengelolaan obat dan vaksin sesuai stndar			90%	90%								
Peningkatan sistem informasi manajemen obat dan perbekalan kesehatan di Prov. Riau	Persentase implementasi e-logistik			100%	100%								
<b>Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>	<b>Persentase Fasyankes yang melaksanakan deteksi dan tata laksana dini faktor resiko penyakit tidak menular</b>			<b>80%</b>	<b>80%</b>								
Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) sesuai standar (HT, DM, Keswa dan Rokok)			60%	60%								
Pengembangan Posbindu PTM	Persentase kab/kota dengan Posbindu aktif			60%	60%								
Pengadaan bahan dan alkes deteksi dini penyakit tidak menular	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit TidakMenular (PTM)			-	-								
Peningkatan surveilans penyakit tidak menular	Persentase kab/kota yang meningkatnya surveilans PTM			60%	60%								

Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	(1) Persentase Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan analisis kesehatan) (2) Persentase RSU Kab/Kota Kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang			95 % 95%	95 % 95%								
Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau	Jumlah paramedis PTT yang diterima			200 orang	200 orang								
Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau	Persentase pemohon STR yang diusulkan ke MKTP			100 %	100 %								
Pengelolaan data tenaga kesehatan kab/kota Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di kab/kota Prov. Riau			12 dok	12 dok								
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kab/kota yang ditingkatnya kompetensi SDM kesehatannya			12 kab/kota	12 kab/kota								
Pemerataan tenaga kesehatan kab/kota se Provinsi Riau	Tersedianya data tenaga kesehatan pada sarana kesehatan di kab/kota se Provinsi Riau			-	-								
Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki SDM kesehatan yang ditingkatkan mutunya			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program intersif tenaga kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang melaksanakan intership sesuai dengan buku panduan			100%	100%								
<b>Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan</b>	<b>Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi</b>			<b>78%</b>	<b>78%</b>								
Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan			2 Dok	2 Dok								
Pengembangan Bank Data dan Informasi	Persentase bidang/UPT dan seksi yang tersedia data kesehatan terintegrasi			100%	100%								
Pengelolaan data cepat PKM di Provinsi Riau	Persentase FKTP milik pemerintah yang tersedia data cepat secara online			-	-								
Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil) di Provinsi Riau dan kab/Kota			13 dokumen	13 dokumen								
Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-Propinsi riau	Persentase Kepala Dinas dan Direktur RS di Provinsi Riau yang mengikuti forum kepala dinas se-propinsi Riau (2017-2019)			100%	100%								
Sistem Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen SKP Riau			-	-								
Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen SOP dinas kesehatan Provinsi Riau			1 dok	1 dok								
Peningkatan SDM Perencanaan Kesehatan	Persentase rencana yang mengikuti pertemuan			90%	90%								
Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Dokumen kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Provinsi Riau			100%	100%								
Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah)	Jumlah dokumen kesepakatan kebijakan pembangunan kesehatan daerah			1 Dok	1 Dok								
Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang terevaluasi kegiatan bersumber APBN/APBD prov Riau			100%	100%								

Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang menggunakan SIKDA Generik (2018-2019) dan Maintenance infrastruktur SIK			65%	65%								
Pengadaan Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Jumlah paket Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 2. Persentase Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang dirawat			1 Paket dan 100 %	1 Paket dan 100 %								
<b>Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan</b>	<b>(1) Persentase Tenaga kesehatan yang dilatih dengan kompetensi baik</b>  <b>(3) Persentase Penelitian kesehatan yang dimanfaatkan</b>			<b>1] 95%</b> <b>2] 100%</b>	<b>1] 95%</b> <b>2] 100%</b>								
Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan UPT, Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat	Jumlah SDM yang mengikuti diklat mutu dan kapasitas			-	-								
Penelitian bidang kesehatan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan			-	-								
Peningkatan sumber daya manusia kesehatan olah raga masyarakat	Jumlah orang yang dilakukan test kebugaran			-	-								
Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan			400 org	400 org								
Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Mutu dan Kapasitas			100%	100%								
Evaluasi Pasca Pelatihan	Persentase peserta yang menerapkan hasil pelatihan sesuai standar			85%	85%								
Penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah jenis Diklat yang dibutuhkan			2 Jenis	2 Jenis								
Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan			330 orang	330 orang								
<b>Program Penanggulangan Krisis Kesehatan</b>	<b>(1) Persentase Krisis Kesehatan termasuk KLB yang ditangani &lt; 24 jam</b> <b>(2) Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat</b>			<b>100% dan 68 %</b>	<b>100% dan 68 %</b>								
Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim	Persentase penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim yang direspon dalam waktu < 24 jam			80%	80%								
Pengadaan peralatan penanggulangan krisis kesehatan	Jumlah paket peralatan penanggulangan krisis kesehatan yang diadakan			-	-								
Peningkatan mutu pelayanan penanggulangan krisis kesehatan	Rentang waktu tersedianya dana penanggulangan krisis			12 bln	12 bln								
<b>Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan</b>	<b>Persentase Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinis dan Lingkungan Yang dilayani telah terakreditasi</b>			<b>Klinis = 70%</b> <b>Lingk = 100%</b>	<b>Klinis = 70%</b> <b>Lingk = 100%</b>								







Rp	42.871.401.600
----	----------------



























Tabel T-C. 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020  
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
					222.935.575.310					311.573.113.361	
	NON URUSAN				10.007.456.472	NON URUSAN				22.995.642.123	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	7.744.644.222	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100	13.931.577.123	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 Surat	34.611.840	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 Surat	35.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	144 Rek	1.635.462.996	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	144 Rek	1.635.462.996	
3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	339.985.000	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	700.000.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	774.880.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	1.447.353.000	
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	109.444.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	160.000.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	161.198.280	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	171.198.280	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	190.714.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	200.000.000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	-	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	2.135.462.968	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	193.438.106	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	199.999.879	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	269.740.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	3.000.000.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kl	542.980.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kl	650.000.000	

12	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administasi kantor yang disediakan	100 ob	2.686.600.000	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administasi kantor yang disediakan	100 ob	2.786.600.000	
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 ob	805.590.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 ob	810.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>1.687.412.250</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>8.410.265.000</b>	
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan mobil dinas / operasional yang diadakan	1 unit	-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan mobil dinas / operasional yang diadakan	1 unit	500.000.000	
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	271 unit	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	271 unit	1.930.500.000	
16	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Provinsi Riau	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	1 Unit	-	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Provinsi Riau	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	1 Unit	50.000.000	
17	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	107 unit	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	107 unit	3.505.950.000	
18	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	901.212.250	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	635.000.000	
19	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	17 unit	375.700.000	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	17 unit	1.288.315.000	
20	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	107 Unit	410.500.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	107 Unit	500.500.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>100</b>	<b>575.400.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>100</b>	<b>653.800.000</b>	
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	245.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	280.000.000	
22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	80.400.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	93.800.000	
23	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	400 stel	-	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	400 stel	-	
24	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	250.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	280.000.000	
	<b>URUSAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>212.928.118.838</b>	<b>URUSAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>288.577.471.238</b>	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>2.406.967.300</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>9.928.000.000</b>	

			Angka Kematian Ibu diukur dengan Proxy : 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) 2. Kunjungan Antenatal (K4) (%) 3. Angka Kematian Bayi diukur dengan Proxy : Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap ) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	80,00  92,00 92,00 25,00				Angka Kematian Ibu diukur dengan Proxy : 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) 2. Kunjungan Antenatal (K4) (%) 3. Angka Kematian Bayi diukur dengan Proxy : Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap ) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	80,00  92,00 92,00 25,00		PAGU UNTUK PENURUNAN AKB DAN AKABA MASIH RENDAH
25	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	41 persen	108.516.600	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	46 persen	270.000.000	
26	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	65 persen	56.530.100	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	70 persen	280.000.000	
27	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	90 persen	46.882.700	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	100 persen	150.000.000	
28	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	48 persen	386.000.000	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	52 persen	1.850.000.000	
29	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12 kab/kota	-	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12 kab/kota	2.400.000.000	
30	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	16 opd	-	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	19 opd	550.000.000	
31	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 kab/kota	50.000.000	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	12 kab/kota	250.000.000	
32	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan	20 persen	-	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan	25 persen	200.000.000	
33	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Provinsi Riau	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	150 pkm	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Provinsi Riau	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	170 pkm	350.000.000	
34	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	160 pkm	200.000.000	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	180 pkm	250.000.000	
35	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Provinsi Riau	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	60 anak sekolah	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Provinsi Riau	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	90 anak sekolah	250.000.000	
36	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60 kasus	185.000.000	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60 kasus	200.000.000	



37	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93 persen	600.000.000	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi pada balita dan masyarakat	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	94 persen	350.000.000
38	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	64 persen	98.734.600	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	66 persen	250.000.000
39	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36 org	88.999.700	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36 org	350.000.000
40	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	55 persen	-	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	60 persen	475.000.000
41	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1170 desa/kel	-	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1345 desa/kel	370.000.000
42	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	60 persen	72.423.400	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	62 persen	220.000.000
43	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	5 kab/kota	250.000.000	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	6 kab/kota	245.000.000
44	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	22 persen	63.880.200	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	24 persen	200.000.000
45	Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase status gizi balita berdasarkan	13 persen	200.000.000	Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase status gizi balita berdasarkan	12 persen	468.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>860.161 jiwa</b>	<b>189.036.386.450</b>	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>892.754 jiwa</b>	<b>204.138.699.991</b>
46	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraarn Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	85 persen	154.500.000	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraarn Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	88 persen	563.700.000
47	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100 persen	10.000.000.000	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100 persen	18.250.000.000
48	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 dok	-	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 dok	325.000.000
49	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah ke dalam Program JKN	87 persen	178.881.886.450	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar Pemerintah ke dalam Program JKN	87 persen	184.999.999.991
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>7.918.920.300</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			<b>36.089.689.994</b>

			Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar	35 Persen				Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar	45 Persen		
			Persentase FKTP sesuai standar	100 Persen				Persentase FKTP sesuai standar	100 Persen		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau	100 Persen				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau	100 Persen		
			Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100 Persen				Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100 Persen		
			Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	60 Persen				Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	65 Persen		
50	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 persen	153.680.000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 persen	600.300.000	
51	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45 persen	173.000.000	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	48 persen	650.299.994	
52	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	41 persen	843.940.000	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	50 persen	1.200.000.000	
53	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100 persen	200.000.000	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100 persen	550.000.000	
54	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	85 persen	166.000.000	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	88 persen	600.000.000	
55	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	35 persen	68.012.000	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	45 persen	350.000.000	
56	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 persen	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 persen	700.000.000	
57	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	20 persen	110.984.700	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	25 persen	375.000.000	
58	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	45 persen	175.000.000	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	50 persen	800.000.000	
59	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	45 persen	125.000.000	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	50 persen	440.000.000	
60	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	3 pkm	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	5 pkm	450.000.000	
61	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	85 persen	125.000.000	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	100 persen	480.000.000	

62	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	86.753.200	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	275.000.000
63	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	25 persen	122.764.000	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	35 persen	400.000.000
64	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	330.896.400	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	475.000.000
65	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	100 persen	175.000.000	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	100 persen	556.000.000
66	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis	50 persen	197.890.000	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	65 persen	757.000.000
67	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi	50 persen	449.000.000	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentasi Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi	100 persen	4.833.000.000
68	Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	400.000.000	Rapat Kerja Kesehatan Daerah ( RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	1.100.000.000
69	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	100.000.000	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	650.000.000
70	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	100 persen	184.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau	100 persen	860.000.000
71	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 persen	-	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 persen	275.000.000
72	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkatkan kapasitasnya	100 persen	-	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkatkan kapasitasnya	100 persen	300.000.000
73	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	-	Koordinasi, Sosialisasi, Sinkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	630.000.000
74	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	-	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	350.000.000
75	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	720.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	1.200.000.000
76	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	-	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	270.000.000
77	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standard	45 persen	275.000.000	Pelayanan Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium lingkungan sesuai standard	50 persen	1.526.480.000

78	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	712.000.000	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	1.434.400.000	
79	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	-	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	3.960.390.000	
80	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	1.925.000.000	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	2.200.000.000	
81	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	-	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	6.841.820.000	
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	23 persen	2.300.754.600	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	28 persen	8.753.860.000	
		Provinsi Riau	Success Rate TB Paru	90 persen			Provinsi Riau	Success Rate TB Paru	90 persen		
			Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk				Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk		
			Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	93 persen				Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	93 persen		
			Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	65 persen				Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	75 persen		
			Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60 persen				Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen		
			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60 persen				Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70 persen		
82	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	23 persen	190.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	28 persen	210.000.000	
83	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	80 persen	84.680.000	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	90 persen	363.000.000	
84	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Provinsi Riau	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	90 persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Provinsi Riau	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	90 persen	363.130.000	
85	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	428.200.000	
86	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Provinsi Riau	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	70 persen	-	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Provinsi Riau	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	72 persen	190.000.000	

88	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	95 persen	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	100 persen	363.000.000
89	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	85 persen	158.986.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	90 persen	484.000.000
90	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	85 persen	106.520.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	90 persen	484.000.000
91	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD31 )	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu	50 persen	59.148.000	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD31 )	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	60 persen	181.500.000
92	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Provinsi Riau	Persentase desa/kelurahan UCI	88 persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Provinsi Riau	Persentase desa/kelurahan UCI	90 persen	484.000.000
93	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi	92 Persen	93.676.000	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	94 Persen	349.000.000
94	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 Persen	339.563.000	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 Persen	242.000.000
95	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	50 Persen	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	58 Persen	250.000.000
96	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Provinsi Riau	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	25 Persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Provinsi Riau	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	33 Persen	484.000.000
97	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	95 Persen	150.000.000	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	97 Persen	400.000.000
98	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Provinsi Riau	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	97 Persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Provinsi Riau	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	100 Persen	209.000.000
99	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	70 Persen	106.153.000	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	72 Persen	181.000.000
100	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 Persen	-	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 Persen	200.000.000
101	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR < 45 kasus per 100.000 pddk	66.446.600	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR < 44 per 100.000 pddk	459.500.000
102	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	70 Persen	45.911.600	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	80 Persen	160.150.000

103	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	46.828.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	152.750.000	
104	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Persentase eliminasi Hepatitis B	90 persen	51.052.600	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Persentase eliminasi Hepatitis B	100 persen	150.000.000	
105	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacangan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacang	77 persen	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacangan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacang	79 persen	170.000.000	
106	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	51.257.600	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	209.000.000	
107	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	60 persen	230.032.200	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	70 persen	752.590.000	
108	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	28 persen	110.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	32 persen	476.150.000	
109	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA		Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 laporan	-	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA		Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 laporan	357.890.000	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>		<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	<b>51 persen</b>	<b>3.249.580.088</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>		<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	<b>56 persen</b>	<b>12.932.820.000</b>	
			<b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>	<b>55 persen</b>				<b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>	<b>58 persen</b>		
			<b>Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik</b>	<b>60 persen</b>				<b>Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik</b>	<b>60 persen</b>		
110	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	65 persen	50.000.000	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	70 persen	165.000.000	
111	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	70 persen	110.000.000	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	75 persen	415.000.000	
112	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	83 persen	-	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	85 persen	165.000.000	
113	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) yang dibina sesuai standar	55 persen	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) yang dibina sesuai standar	60 persen	560.000.000	

114	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	87 persen	117.000.000	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	89 persen	450.000.000
115	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP, alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	84 persen	615.995.221	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP, alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	86 persen	2.000.000.000
116	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	84 persen	1.816.584.867	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	86 persen	7.505.990.000
117	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 persen	200.000.000	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 persen	854.400.000
118	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar		Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	100.000.000	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar		Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	517.750.000
119	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau		Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	80 persen	90.000.000	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau		Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	85 persen	299.680.000
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan</b>  <b>Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>  <b>Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar</b>	<b>72 persen</b>  <b>37 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>7.787.196.300</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan</b>  <b>Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>  <b>Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar</b>	<b>74 persen</b>  <b>39 persen</b>  <b>100 persen</b>	<b>12.948.901.253</b>
110	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 persen	-	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 persen	110.817.000
111	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	1 dok	55.000.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	12 dok	273.000.000
112	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Riau	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	50.000.000	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Riau	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	128.447.550
113	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	80.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	333.900.000
114	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, nnds/npdes)	Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	95 persen	124.016.300	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, nnds/npdes)	Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	144 persen	500.000.000

115	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	5.907.180.000	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	5.907.180.000	
118	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkan pelatihan Sesuai Standar	61 persen	150.000.000	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkan pelatihan Sesuai Standar	61 persen	1.143.985.920	
119	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	32 persen	850.000.000	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	32 persen	2.549.450.000	
122	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	-	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	222.270.783	
125	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	540 org	521.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	540 org	1.620.850.000	
126	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	50.000.000	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	159.000.000	
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	<b>65 Persen</b>	<b>228.313.800</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	<b>67 Persen</b>	<b>3.785.500.000</b>	
127	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	228.313.800	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	285.500.000	PAGU TIDAK SESUAI TERLALU RENDAH DARI TAHUN SEBELUMNYA
128	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Provinsi Riau	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	100 persen	-	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Provinsi Riau	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	100 persen	3.500.000.000	

Pekanbaru, Juli 2019





























**Tabel T-C. 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Provinsi Riau**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	NON URUSAN				
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu</b>	<b>100 Persen</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Riau	Jumlah surat yang dikirim	1500 Surat	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	12 jns	
3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi Riau	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	200 unit	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	13 unit	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Riau	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 jenis	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Provinsi Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi Riau	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 porsi	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Provinsi Riau	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kl	
12	Penyediaan jasa administrasi kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	100 ob	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 ob	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	271 unit	
10	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Provinsi Riau	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	1 Unit	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	107 unit	
4	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Provinsi Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 ruang	
5	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	Provinsi Riau	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara	2 Unit	
6	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	17 unit	
7	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan mobil dinas / operasional yang diadakan	1 unit	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>100</b>	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi Riau	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	350 stel	
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	134 stel	
3	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Provinsi Riau	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	400 stel	
4	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Provinsi Riau	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	350 stel	
	<b>URUSAN KESEHATAN</b>				
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Provinsi Riau</b>			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Angka Kematian Ibu diukur dengan Proxy : 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	80,00	PAGU UNTUK PENURUNAN AKB DAN AKABA MASIH RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN PAGU DANA PADA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
			2. Kunjungan Antenatal (K4) (%)	92,00	
			3. Angka Kematian Bayi diukur dengan Proxy : Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap )	92,00	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	25,00	
1	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	41 persen	
2	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	65 persen	
3	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	90 persen	
4	Penyusunan Kebijakan publik berwawasan kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan	3 kebijakan	
5	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Provinsi Riau	Persentase Capaian UKBM Aktif	48 persen	
6	Advokasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan	Provinsi Riau	- Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa minimal 10%	15 persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
7	Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12 kab/kota	
8	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Provinsi Riau	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	16 opd	
9	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi Standar	Provinsi Riau	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	10 kab/kota	
10	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan lanjut Usia	Provinsi Riau	Persenstase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan Pelayanan Geriatri Terpadu	20 persen	
11	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Provinsi Riau	Puskesmas yang melaksanakan Program Kespro Caten	150 pkm	
12	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC )	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	160 pkm	
13	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah	Provinsi Riau	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	60 anak sekolah	
15	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	60 kasus	
16	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi pada balita dan masyarakat	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	93 persen	
17	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Provinsi Riau	Persentase penanggulangan masalah gizi Ibu Hamil dan Remaja Putri	64 persen	
18	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Provinsi Riau	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36 org	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
19	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Provinsi Riau	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	55 persen	
20	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Provinsi Riau	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1170 desa/kel	
21	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	60 persen	
22	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	Provinsi Riau	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	5 kab/kota	
23	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Provinsi Riau	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	22 persen	
24	Surveilans Gizi	Provinsi Riau	Persentase status gizi balita berdasarkan	13 persen	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>860.161 jiwa</b>	
31	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	85 persen	
32	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Provinsi Riau	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	100 persen	
33	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 dok	
34	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Provinsi Riau	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	87 persen	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Provinsi Riau</b>			
			<b>Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar</b>	<b>35 Persen</b>	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Persentase FKTP sesuai standar	100 Persen	
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau .....	100 Persen	
			Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100 Persen	
			Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	60 Persen	
36	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	45 persen	
37	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	45 persen	
38	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	41 persen	
39	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	100 persen	
40	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	85 persen	
41	Pembinaan Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	35 persen	
42	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 persen	
43	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	20 persen	
44	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	45 persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
45	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	45 persen	
46	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Provinsi Riau	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	3 pkm	
47	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	85 persen	
48	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	100 persen	
49	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	25 persen	
50	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	100 persen	
52	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	100 persen	
53	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase SDM Provinsi, Kab/Kota rawan bencana yang telah dilatih penanggulangan krisis kesehatan	50 persen	
54	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Provinsi	50 persen	
56	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	1 dok	
57	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 dok	
58	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau.	100 persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
59	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 persen	
60	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100 persen	
61	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 persen	
62	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 persen	
63	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Provinsi Riau	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 persen	
64	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 persen	
66	Pelayanan Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium lingkungan sesuai standard	65 persen	
67	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Provinsi Riau	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standard	45 persen	
68	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	
	Pemenuhan ketersediaan Alat-alat Pelayanan laboratorium Klinis	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan alat-alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	100 persen	
VII	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang diobati	23%	
			Success Rate TB Paru	90%	
			Annual Parasit Inciden (API) / Jumlah Kab/Kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk	< 1 / 1000 penduduk	
			Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	93%	
			Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	65%	
			Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	
			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	
69	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Provinsi Riau	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	23 persen	
70	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Provinsi Riau	Persentase bumil yang diperiksa syphilis dan diobati	80 persen	
71	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Provinsi Riau	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	80 persen	
72	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Provinsi Riau	Succes Rate TB	90 persen	
73	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Provinsi Riau	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	70 persen	
74	Pengadaan Logistik P3M	Provinsi Riau	Persentase kebutuhan Logistik Program P3M yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	70 persen	
75	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Provinsi Riau	jumlah kasus malaria positif (konfirmasi Laboratorium) di kabupaten/kota selama satu tahun per 1000 penduduk	< 1 / 1000 kasus penduduk	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
76	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Provinsi Riau	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	85 persen	
77	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Provinsi Riau	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	85 persen	
78	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD3I )	Provinsi Riau	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	50 persen	
79	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Provinsi Riau	Persentase desa/kelurahan UCI	88 persen	
82	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Provinsi Riau	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	92 Persen	
83	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Provinsi Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	100 Persen	
84	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	50 Persen	
85	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Provinsi Riau	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	25 Persen	
86	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Provinsi Riau	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	95 Persen	
87	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Provinsi Riau	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	97 Persen	
88	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Provinsi Riau	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	70 Persen	
89	Pengendalian Kasus Zoonosis	Provinsi Riau	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	100 Persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
90	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Provinsi Riau	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	IR < 45 per kasus 100.000 pddk	
91	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Provinsi Riau	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui Program MTBS	70 Persen	
92	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Provinsi Riau	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	100 persen	
93	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Provinsi Riau	Persentase eliminasi Hepatitis B	90 persen	
94	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacangan	Provinsi Riau	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacung	77 persen	
95	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Provinsi Riau	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 persen	
96	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Provinsi Riau	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	60 persen	
98	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA	Provinsi Riau	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	28 persen	
	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA		Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 laporan	
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>		<b>Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	<b>51%</b>	
			<b>Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar</b>	<b>55%</b>	
			<b>Persentase ketersediaan obat,vaksin dan logistik</b>	<b>98%</b>	
99	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	65 persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
100	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	70 persen	
101	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Provinsi Riau	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	83 persen	
103	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian ,alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT) yang dibina sesuai standar	55 persen	
105	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM, sarana, prasarana dan operasional pelayanan di UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	100 persen	
106	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	87 persen	
107	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	84 persen	
108	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	84 persen	
109	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 persen	
	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar		Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau		Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	80 persen	
IX	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan</b>	72%	
			<b>Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki 4 Dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang</b>	37%	
			<b>Persentase Pelaksanaan Diklat Kesehatan yang sesuai standar</b>	100%	
110	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 persen	
111	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	1 dok	
112	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Provinsi Riau	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	100 persen	
113	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 persen	
114	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, ppds/ppdgs)	Provinsi Riau	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	95 persen	
115	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	191 org	
117	Penyelenggaraan Pelaksanaan UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan UPT Bapelkes	100 persen	
118	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	61 persen	
119	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Provinsi Riau	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	32 persen	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
122	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Provinsi Riau	% Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	60 persen	
123	Penyusunan Kebutuhan Pelatihan SDM Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan	2 dok	
125	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Provinsi Riau	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	540 org	
126	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Provinsi Riau	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	2 buku	
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>		<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	<b>65 Persen</b>	
127	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana , prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 persen	
128	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Provinsi Riau	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	100 persen	

Pekanbaru, Juli 2019


  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI RIAU  
 DINAS KESEHATAN  
 Dra. Hj. NINI YULIANI NAZIR, Apt, MM  
 Penanggung Jawab Muda  
 NIP. 19560717 199102 2 001

































**DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**Jl. Cut Nyak Dien III Pekanbaru**

**Telp. (0761) 39973 – 23810, Fax (0761) 39973**

**Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : [dinaskesehatan@riau.go.id](mailto:dinaskesehatan@riau.go.id)**